

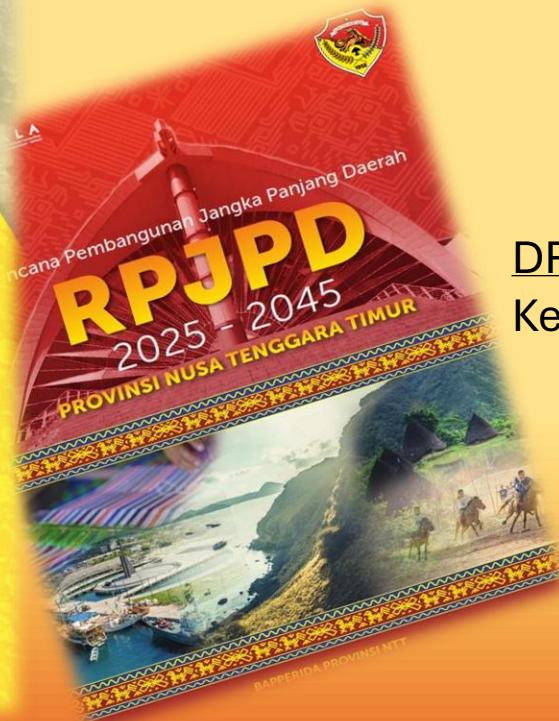
RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025 - 2029



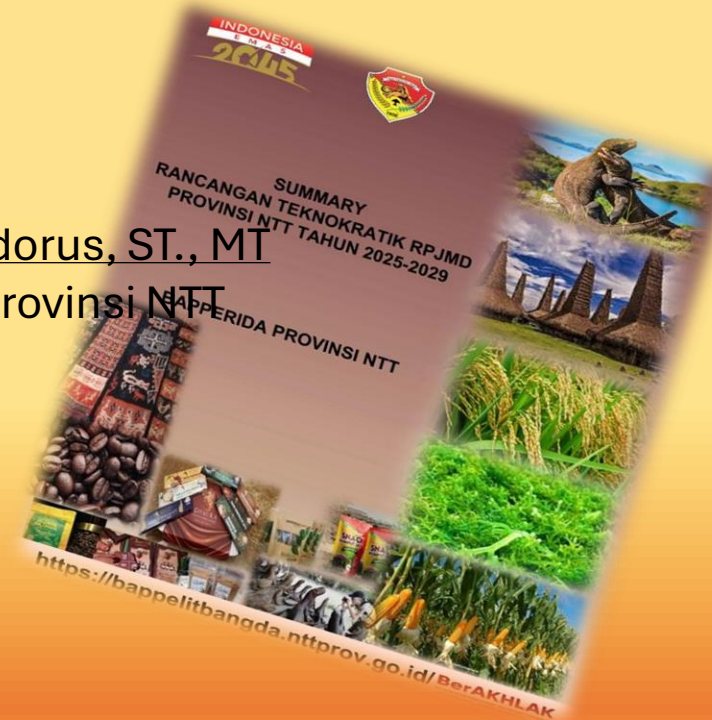
**AYO BANGUN
NTT**

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
Provinsi Nusa Tenggara Timur

RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI NTT TAHUN 2025-2029



DR. Alfonsius Theodorus, ST., MT
Kepala Bapperida Provinsi NTT



OUTLINE

1

DASAR HUKUM

2

**TAHAPAN PENYUSUNAN
RPJMD**

3

**HUBUNGAN ANTAR
DOKUMEN PERENCANAAN**

4

TIMELINE PENYUSUNAN RPJMD

5

**SISTEMATIKA RPJMD
TAHUN 2025-2029**



DASAR HUKUM

1

UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

2

UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

3

**UNDANG-UNDANG NO 59 TAHUN 2024 TENTANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
Menengah NASIONAL (RPJPN) TAHUN 2025-
2045**

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

5

PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI
RANPERDATENTANG RPJPD DAN RPJMD, SERTA TATA CARA
PERUBAHAN RPJPD, RPJMD, DAN RKPD

6

**PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN) TAHUN 2025-2029**

7

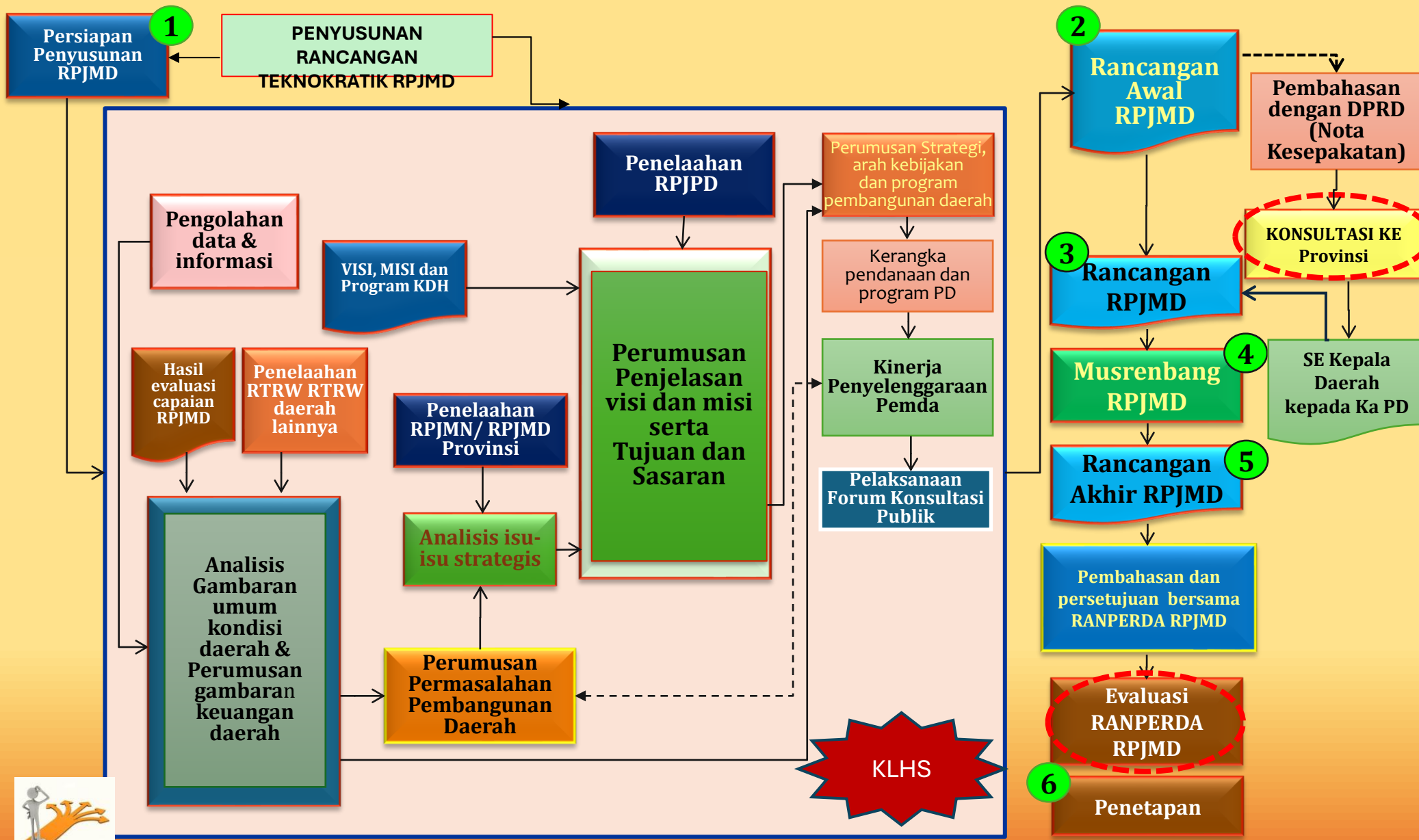
**PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA Menengah DAERAN
(RPJPD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2025-2045**

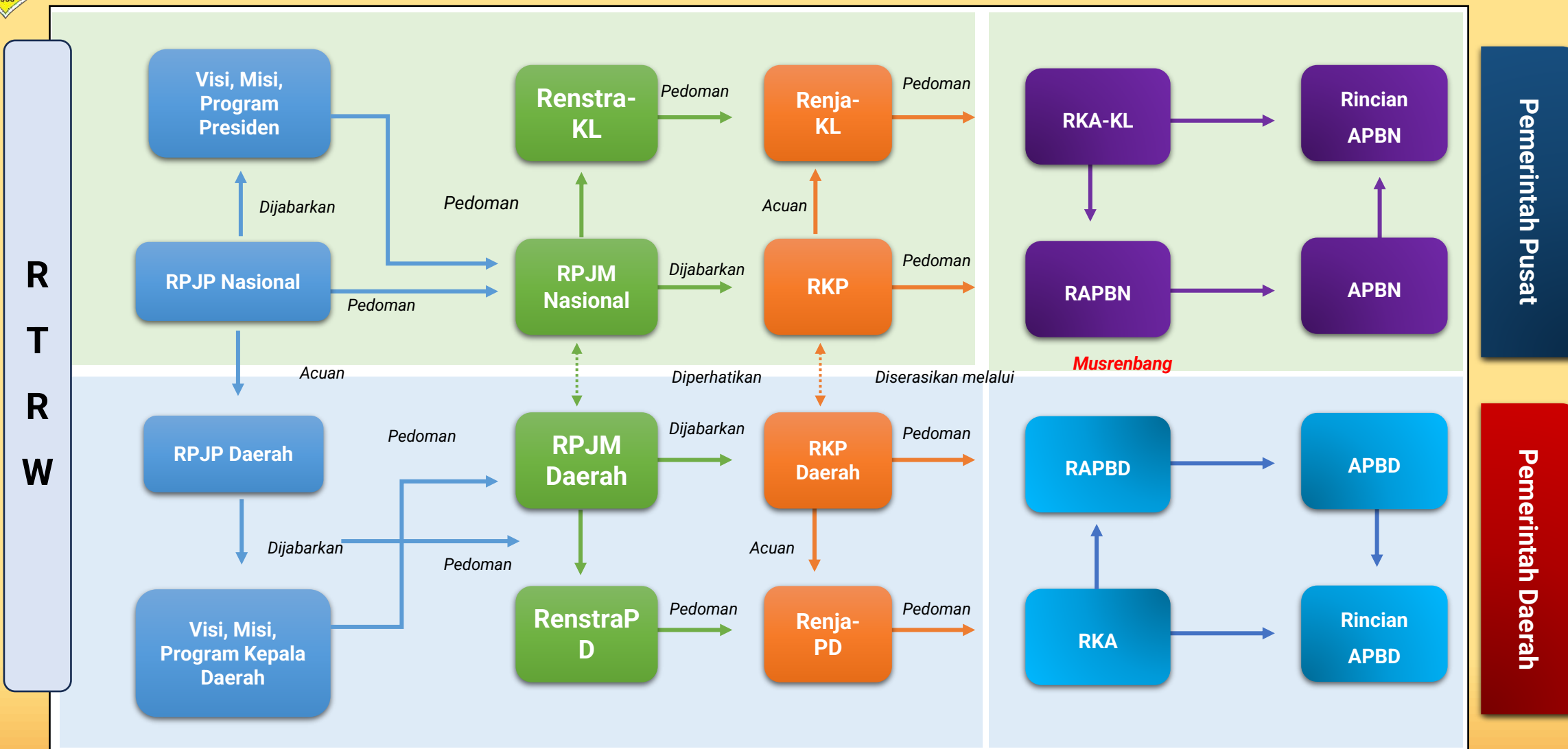
8

lintruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029



BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD







MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RPJMD

MAKSUD:

1. Memberi arah pembangunan jangka Menengah bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mempedomani arah pembangunan jangka Menengah Nasional;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka Menengah yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
3. Secara politik menjadi acuan bagi Calon Kepala Daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah;
4. Secara materiil menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam penyusunan rancangan pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
5. Secara materiil menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka



TUJUAN:

1. menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2025 -2029;
2. Menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029 dan prioritas pembangunan pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah;
3. Menetapkan sasaran pokok serta indikator makro dan target capaian pada setiap sasaran pokok sebagai dasar pengukuran tingkat perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029;
4. Sebagai landasan operasional bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk menetapkan Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam Setiap tahun
5. Sebagai landasan materiil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran dan target capaiannya dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah



TENTAIVE JADWAL PENYUSUNAN RPJMD MENURUT IMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2025

Kegiatan		Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD								
	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD								
	Penyiapan Agenda Kerja								
	Penyiapan Data dan Informasi								
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD PROVINSI	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis								
	Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)								
	Konsultasi Publik								
	Penyampaian Ranwal ke DPRD								Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan								Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke MDN								
	Penyusunan Rancangan Musrenbang								Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir)								
	Reviu APIP								Dilakukan dalam 5 hari kerja
PROSES PENETAPAN RPJMD PROVINSI	Penyampaian Ranperda kepada DPRD								Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD								
	Persetujuan Bersama								Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD								Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD								Paling lambat 6 bulan
PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD KAB/KOTA	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis								
	Penyusunan Ranwal								
	Konsultasi Publik								
	Penyampaian Ranwal ke DPRD								Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan								Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur								



Kegiatan		Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
	Penyusunan Rancangan								
	Musrenbang								
	Penyusunan Rankhir								Paling lambat 75 hari
	Reviu APIP								Dilakukan dalam 5 hari kerja
PROSES PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA	Penyampaian Ranperda kepada DPRD								Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD								
	Persetujuan Bersama								Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD								Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD								Paling lambat 6 bulan (Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)



JADWAL PENYUSUNAN RPJMD

	RANCANGAN TEKNOKRATIK	BAPPERIDA	SUDAH ADA
A	PERSIAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN		
	1 SK TIM PENYUSUN	LINTAS SEKTOR	PROSES BIRO HUKUM
	2 Rapat Tim Kecil Ranwal RPJMD	PPEPD	Selesai
	3 Rapat Lanjutan Internal RPJMD	PPEPD	Selesai
	4 Rapat Tim Penyusun RPJMD	Bapperida	Selesai
	- Pemaparan RPJMN		
	- Pemantapan Dasa Cita - Asta Cita		
	- Pembagian Tugas Bab Per Bab dan Pedoman Penulisan		
B	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD		BERPROSES
	5 Penulisan Bab per bab	Bapperida	23 April 2025
	6 Pembahasan bab per bab	Bapperida	14-17 april 2025
	7 Pertemuan Penyelarasan dengan TIM AHLI RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Bapperida	25 April 2025
	8 Rapat Pemaparan Draft 0		23 April 2025
	- Perbaikan	Bapperida	
	9 KONSULTASI PUBLIK RANWAL RPJMD	Bapperida	28 April 2025
	- Perbaikan		28 April – 4 Mei 2025
	10 SURAT KE BANMUS DPRD (Pengantar DOK RANWAL RPJMD)	Bapperida	5 - 6 Mei 2025
	- Pemaparan ke BANMUS	Bapperida	5 Mei 2025
	11 SURAT KE KEMENKUMHAM (Pengantar DOK RANWAL RPJMD)	Bapperida	4 Mei 2025
	12 SURAT KE BIRO HUKUM (DRAFT RANPERDA)	Bapperida	5 Mei 2025
	13 KONSULTASI RANWAL RPJMD KE DITJEN BANGDA - KEMENDAGRI	PEM PROV NTT	9 Mei 2025
	- Perbaikan menjadi Rancangan RPJMD	Bapperida	9-Mei 2025
	14 Pertemuan Penyelarasan dengan TIM AHLI RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Bapperida/ TIM AHLI	
	15 Pertemuan Penyelarasan dengan KEMENKUMHAM RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	Bapperida/KEMENKUMHAM/BIRO HUKUM	13 Mei 2025
C	PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD		13-15 Mei 2025
	16 MUSRENBANG RPJMD	Bapperida	15 Mei 2025
	- Perbaikan	Bapperida	
	17 PEMBAHASAN DENGAN DPRD PROVINSI NTT	PEM PROV NTT (BIRO HUKUM)	15-22 Mei 2025
	- KOMISI	PEM PROV NTT	
	- PARIPURNA	PEM PROV NTT	
	- PERSETUJUAN BERSAMA	DPRD/PEM PROV NTT	
	17 REVIU APIP	INSPEKTORAT	23-28 Mei 2029
D	PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD		23-28 Mei 2029
	18 PERBAIKAN HASIL DARI DPRD	Bapperida	23-28 Mei 2029
	19 TANGGAPAN REVIU APIP	Bapperida	23-25 Mei 2029
	20 EVALUASI RANPERDA RPJMD	PEM PROV NTT	25-28 Mei 2025
	21 VERIFIKASI INTEGRASI KLHS RPJMD	PEM PROV NTT	2 Juni 2025
	- Perbaikan Hasil Evaluasi	Bapperida	
	21 PENETAPAN RPJMD	JAKARTA/BIRO HUKUM	5 Juni 2025



BAB I **PENDAHULUAN**

BAB II **GAMBARAN UMUM DAERAH**

BAB III **VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB IV **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

BAB V **PENUTUP**

- Aspek Geografi dan Demografi
- Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- Aspek Daya saing Daerah
- Tingkat Inflasi Daerah

- Kinerja Pendapatan Daerah 2019-2024
- Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030

- Permasalahan
- Isu Strategis Daerah

- **Program prioritas daerah**
(Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja)

- **Program Perangkat Daerah**
Kumpulan seluruh program yang terdapat dalam bab VI Renstra
Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Perangkat Daerah

- **Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah**
Merupakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi
- **Indikator Kinerja Daerah (IKD)**
Merupakan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah



PENDAHULUAN

Bab I

- Penyusunan Dokumen Rancangan awal RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah dengan periode 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 dengan Spirit “**AYO BANGUN NTT**” dengan Visi “**NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan**” merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045



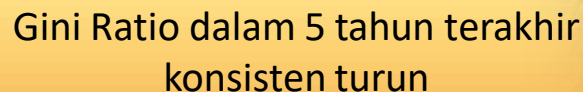
RANCANGAN AWAL
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025 - 2029



**AYO BANGUN
NTT**

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Rancangan Awal
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025-2029



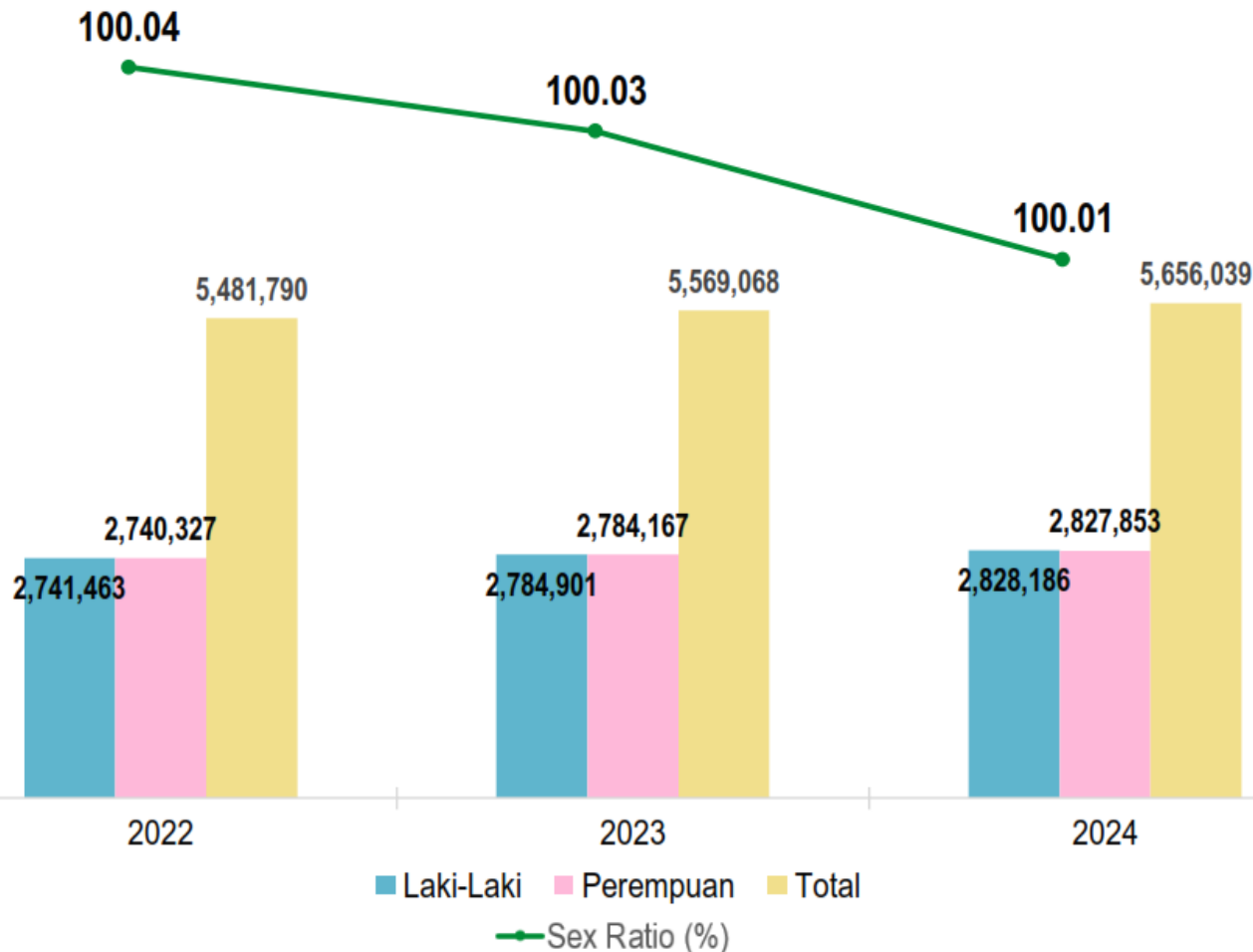


CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DI PROVINSI NTT TAHUN 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,84	2,52	3,45	2,08	3,73
2	Angka kemiskinan	%	21,21	20,44	20,23	19,96	19,02
3	Inflasi	%	0,78	1,67	6,65	2,42	0,19
4	IPM	poin	65,19	65,28	65,9	68,4	69,14
5	Usia Harapan Hidup	tahun	67,01	67,15	67,47	67,77	72,39
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,63	7,69	7,7	7,82	8,02
7	TPT	%	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
8	Indeks Gini	poin	0,356	0,339	0,34	0,325	0,316

KONDISI DEMOGRAFI NTT

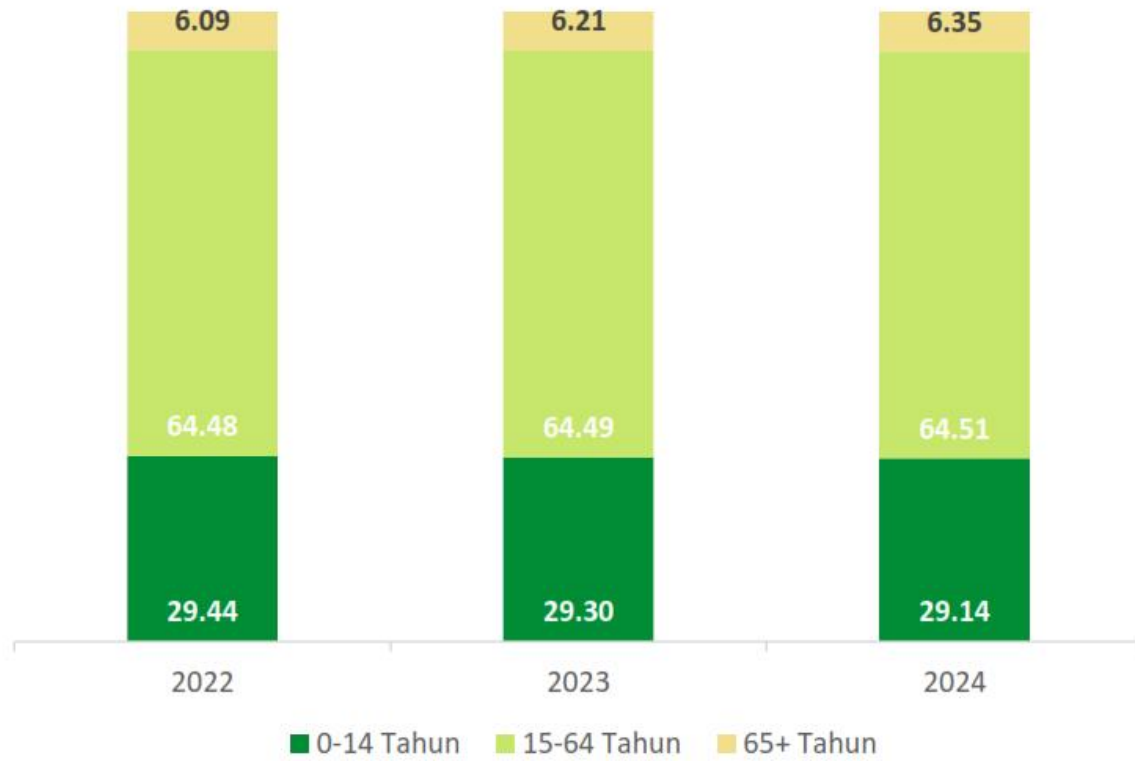
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Provinsi NTT, 2022-2024



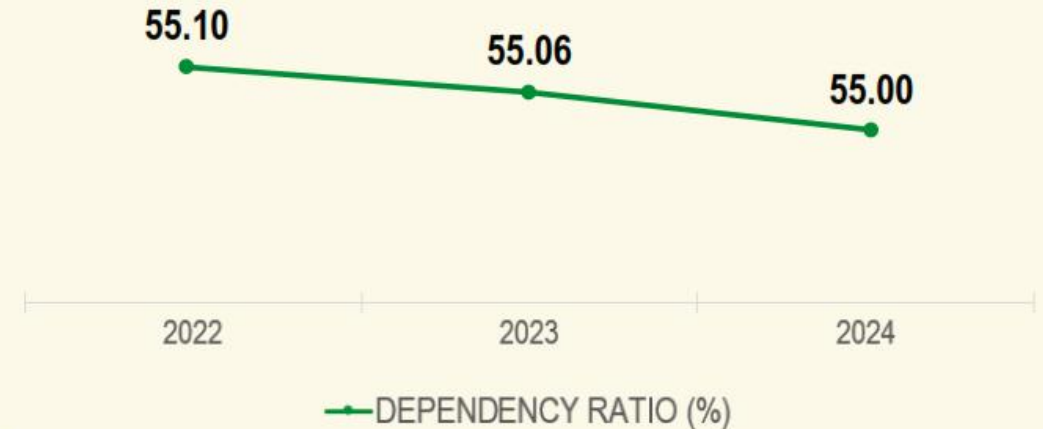
- Berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2035 hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi NTT pada tahun 2022-2024 tidak berbeda signifikan.
- Sex Ratio* di Provinsi NTT selama tiga tahun tersebut berkisar 100,01 sampai 100,04 persen yang berarti terdapat 100 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

KONDISI DEMOGRAFI NTT

Proporsi Penduduk di Provinsi NTT
Menurut Kelompok Umur, 2022-2024*



Dependency Ratio (%) di Provinsi NTT, 2022-2024*



Selama tahun 2022-2024 di Provinsi NTT, setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun), menanggung 55 sampai 56 tahun penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (65+ tahun).

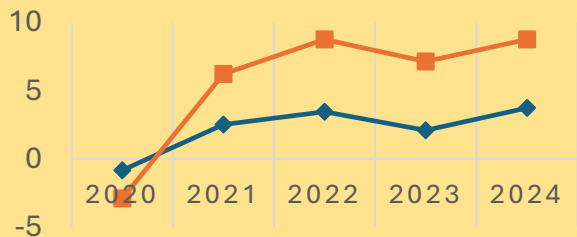
*Berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2035 hasil Sensus Penduduk 2020

KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

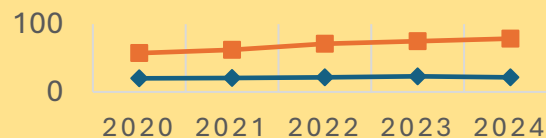
LPE, TINGKAT KEMISKINAN, TINGKAT PENGANGGURAN & GINI RATIO

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan yang juga terlihat berdampak pada **penurunan angka TPT dan persentase penduduk miskin**, walaupun dampak tersebut **belum terlihat signifikan**. Pembangunan Provinsi NTT perlu terus didorong untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas untuk masyarakat melalui **peningkatan nilai tambah sektor primer dan pariwisata** sebagai sektor potensial.

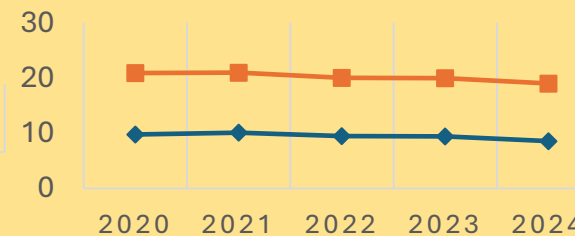
LPE PROVINSI NTT



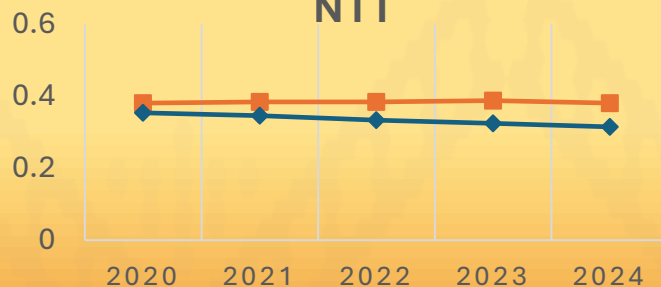
PDRB PER KAPITA
ADHB PROVINSI NTT
(RIBU, RUPIAH)



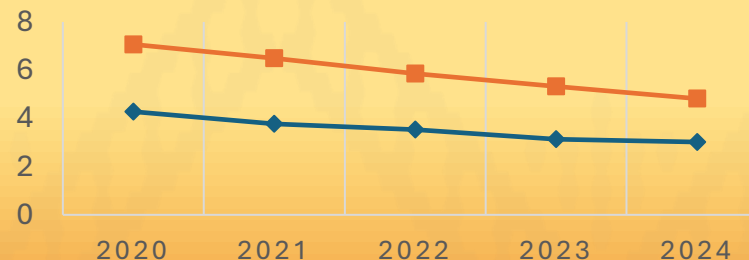
% PENDUDUK MISKIN
PROVINSI NTT



GINI RATIO PROVINSI
NTT



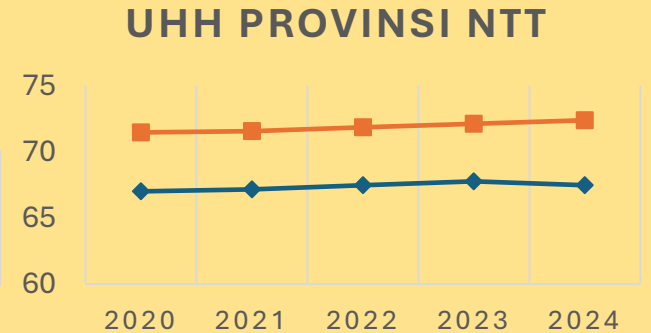
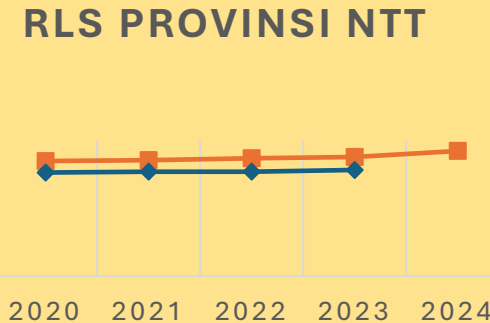
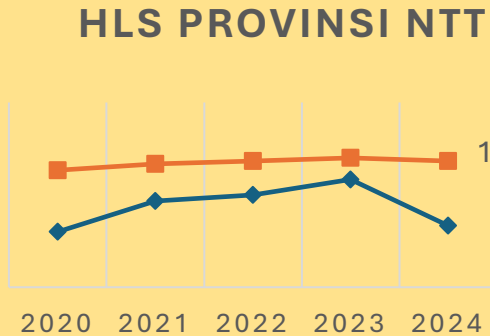
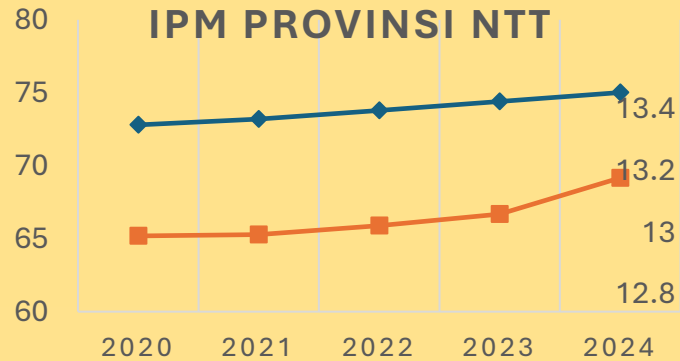
TPT PROVINSI NTT



- Nilai LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK) Prov. NTT berada di bawah capaian nasional. Dalam hal ini Provinsi NTT masih banyak bergantung pada sector primer (Laporan BPS NTT 2024).
- Tingkat pengangguran terbuka Prov. NTT menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan capaian nasional. Namun, pada nilai Persentase Penduduk Miskin Prov. NTT masih lebih tinggi dibandingkan nasional. **Hal ini terindikasi karena masih banyaknya pekerja tidak berbayar atau pekerja keluarga yang bekerja di sektor informal seperti sektor pertanian.**
- Gini rasio tahun 2020-2024 berada di bawah nilai capaian nasional dan menunjukkan tren semakin menurun dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perbaikan rata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi

KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

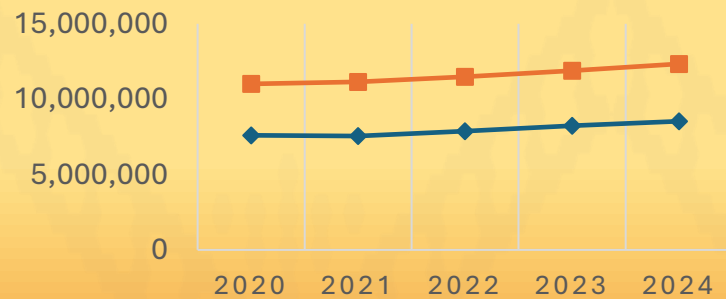
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Keterangan: — Nusa Tenggara Timur — Nasional

IPM Prov. Nusa Tenggara Timur memperlihatkan tren meningkat pada beberapa tahun terakhir, meskipun masih di bawah capaian nasional. **Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum berdampak signifikan pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.**

PENGELUARAN PER KAPITA PROVINSI NTT

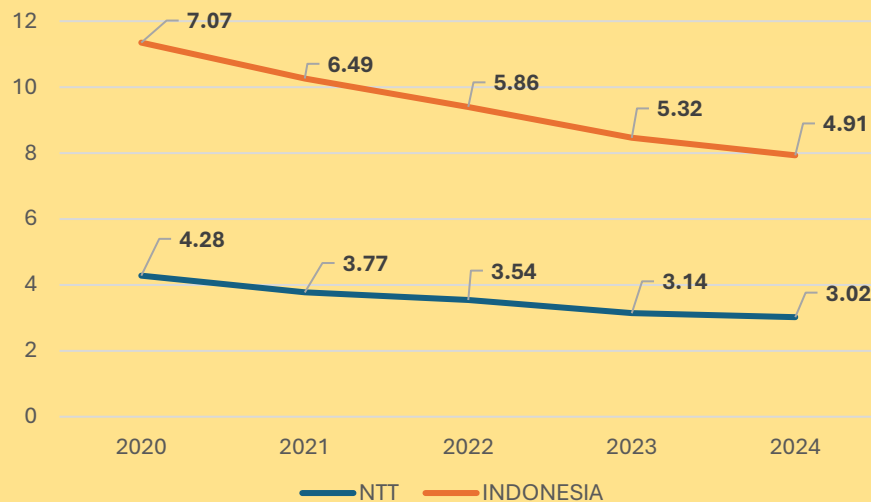


- IPM Prov. NTT tahun 2020-2024 berada di bawah nilai provinsi yang menunjukkan **masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**, meskipun terdapat tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir yang mengindikasikan pembangunan di Prov. **NTT sudah mulai berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.**
- Dilihat dari komponennya, nilai Rata-rata Lama Sekolah Prov. NTT masih di bawah capaian nasional, namun Prov. NTT memiliki nilai Harapan Lama Sekolah yang lebih tinggi dari capaian nasional. Hal ini menunjukkan masa sekolah yang diharapkan dapat dialami lebih lama untuk penduduk 7 tahun ke atas di masa yang akan datang.
- Usia Harapan Hidup Prov. NTT menunjukkan di bawah capaian nasional yang menunjukkan kualitas layanan kesehatan yang masih rendah.
- Pengeluaran per kapita Prov. NTT Tahun 2020 – 2024 masih tergolong rendah dibandingkan capaian nasional. Pengeluaran terbesar Masyarakat sebagian besar masuk di kelompok pangan dengan komoditas atau produk utama yang dibeli adalah Padi-padian serta makanan, minuman jadi, dan sayuran. Sementara untuk kelompok non pangan, pengeluaran terbesar adalah untuk kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga.



ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT Tahun 2020-2024

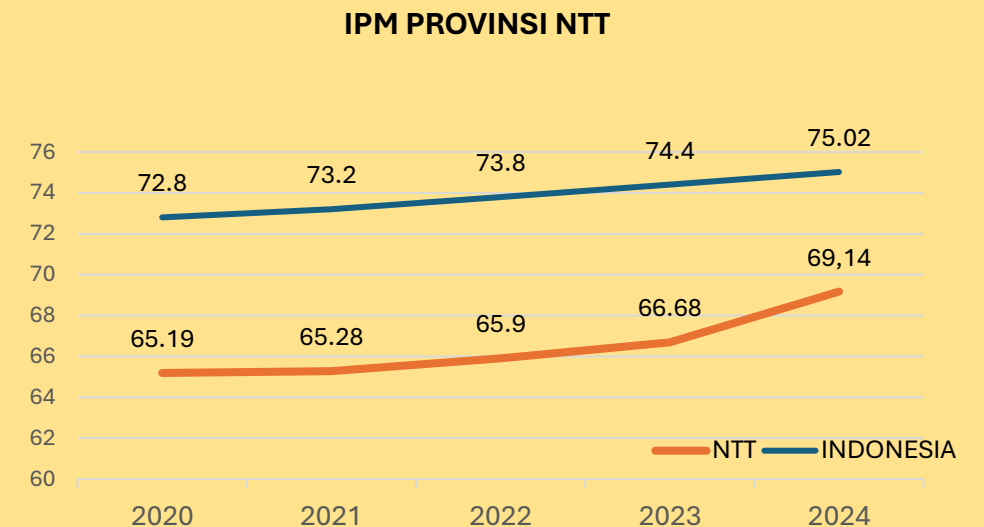


**1,89
poin**

*Gap lebih
rendah dari
Nasional*

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025 (diolah)

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT Tahun 2020-2024



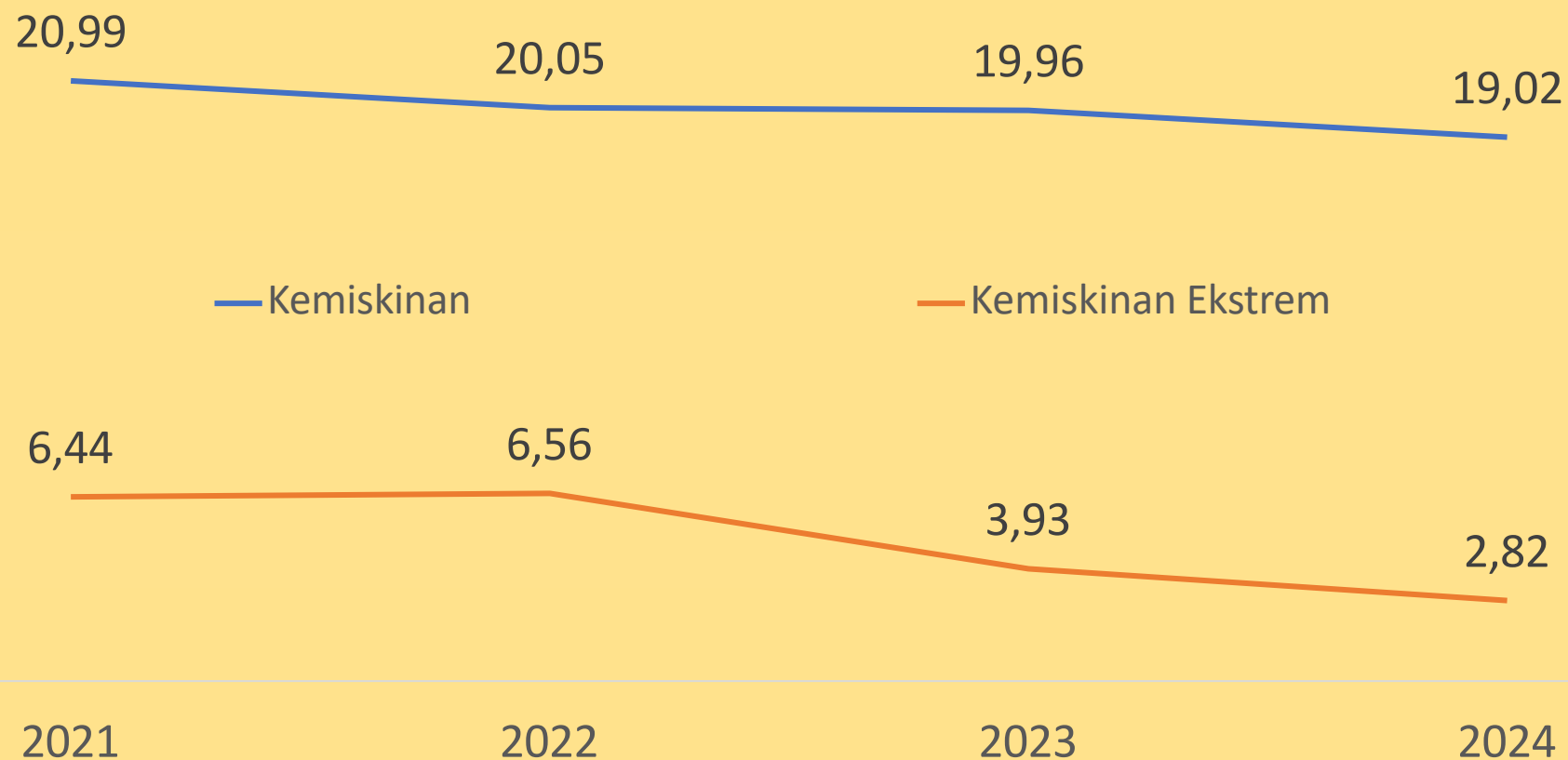
**5,88
poin**

*Gap lebih
rendah dari
Nasional*

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025 (diolah)



KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM





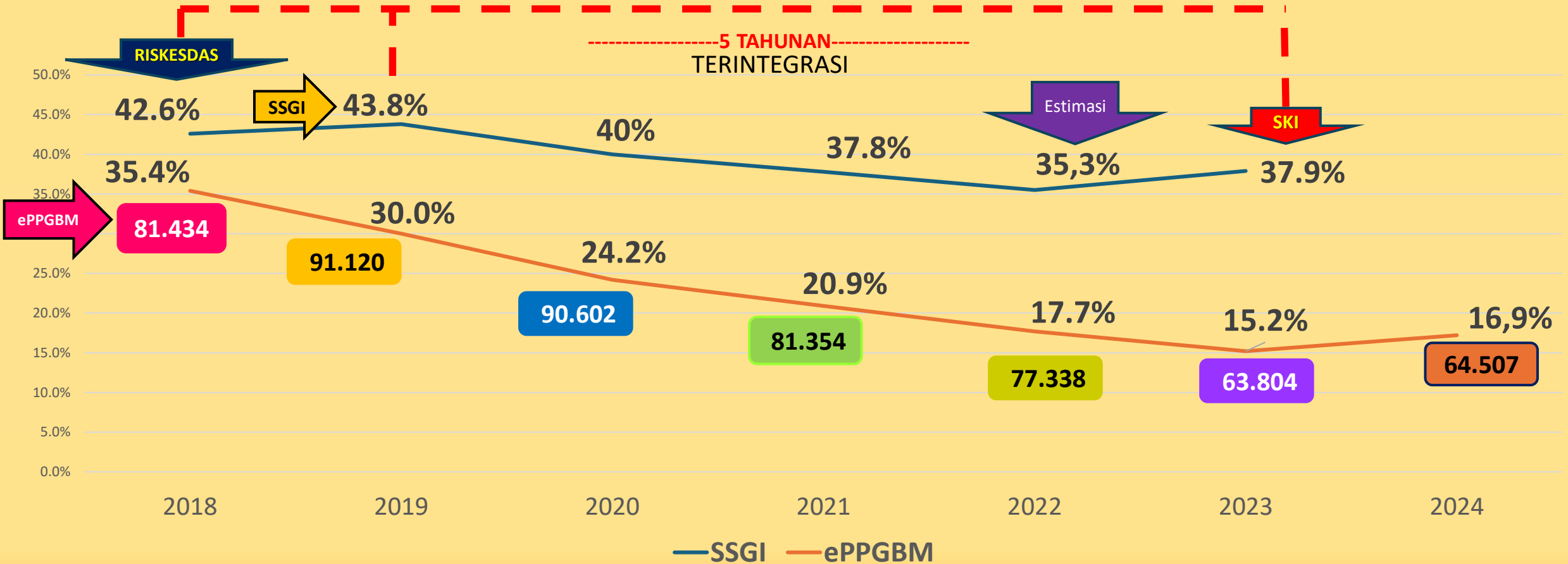
TREN CAPAIAN *STUNTING* DI PROVINSI NTT

Target Nasional 2025 : 18,8%

TARGET NTT 2025 : 33,1 %

Berdasarkan surat Bappenas 17 Mei 2024

BerAKHLAK #bangga
melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Sumber: Laporan e-PPGBM 22 Kabupaten/Kota Provinsi, cutoff, 09 januari 2024 pkl 12.30 WITA

Keterangan : Data tahunan 2024 berbasis periode JUNI (bulan intervensi serentak nasional)



"Estimasi" Target Prevalensi Stunting Provinsi NTT 2025 - 2045

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Terusan Nomor 2, Jakarta 10270
Telepon (+6221) 3183207, 3905690; Faksimili (+6221) 3143274
www.bappenas.go.id

Nomor : B-00318/D.05/PP/06.02/05/2024 17 Mei 2024
Sifat : Biasa
Hal : 1
Pembastaraan Target Prevalensi Stunting Nasional dan Provinsi Tahun 2025 dan 2045

Yth. Pemerinta Surut (daftar tertampi)
1
Tempat :

Memorandum terbitnya hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menghasilkan angka prevalensi stunting tahun 2023 sebesar 21,5% (dari 21,8% di tahun 2022), maka perlu dilakukan pemutakhiran terhadap target penurunan prevalensi stunting yang akan diartikan ke dalam dokumen perencanaan. Sesuai hasil pemutakhiran, terdapat kemungkinan bahwa target prevalensi stunting 2024 sebesar 14% selagi tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024, tidak tercapai. Pemutakhiran target ini kemudian juga digunakan sebagai angka kasualte untuk target prevalensi stunting tahun 2025.

Beberapa poin kunci perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

- Sesuai hasil pemutakhiran, target prevalensi stunting nasional pada tahun 2025 mengalami perubahan dari sebesar 13,5% menjadi sebesar 10,8%. Pengurangan ini menggunakan pendekatan pencapaian target pada tahun 2045 sebesar 5% dengan skenario pengurangan jumlah stunting baru per tahunnya sebesar 25%.
- Untuk target prevalensi stunting di setiap provinsi, kami menggunakan skenario adanya pengurangan jumlah stunting baru sebanyak 20% di setiap daerah. Dengan mempertimbangan kondisi stunting daerah yang beragam saat ini, maka akan diberikan target prevalensi stunting yang berbeda antarprovinsi (beragam).
- Pengurangan jumlah stunting baru setiap tahunnya yang digunakan sebagai pendekatan pemutakhiran target stunting, perlu menjadi perhatian bersama. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penguatan intervensi pencegahan terjadinya stunting dengan fokus pada intervensi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) agar penurunan stunting dapat tercapai optimal.

Dokumen ini akan dibagikan secara elektronik yang diterbitkan dari Badan BerAKHLAK (BerAKHLAK) 0024

Hasil SKI 2023 mendorong adanya perubahan target penurunan stunting secara Nasional Termasuk Provinsi NTT yang dimulai dari Tahun 2025 - 2045, dengan Provinsi NTT mendapat target sebesar **33,1%** di tahun 2025 dan **8,4%** pada tahun 2045

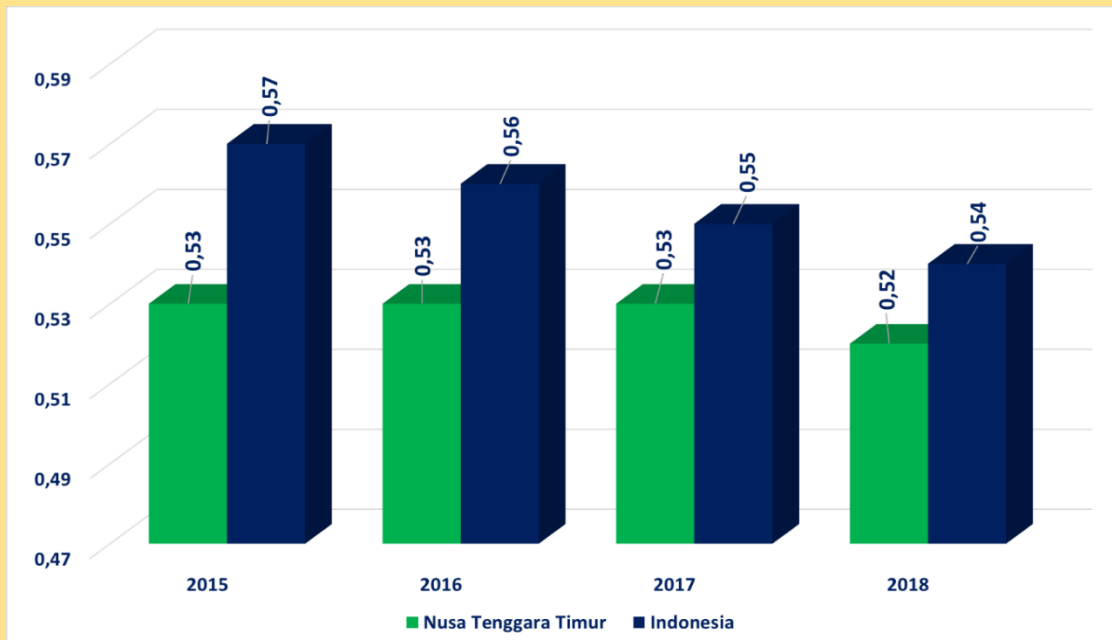
No	Kabupaten/Kota	SKI 2023 (%)	Target 2024 (%)	Target 2025 (%)	Target 2026 (%)	Target 2027 (%)	Target 2028 (%)	Target 2029 (%)	Target 2045 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	KAB SUMBA BARAT	42,5	40,3	37,6	36,3	34,9	33,5	32,2	9,5
2.	KAB SUMBA TIMUR	26,3	25,1	23,5	22,6	21,8	20,9	20,1	5,9
3.	KAB KUPANG	38,4	36,5	34,0	32,8	31,6	30,3	29,2	8,6
4.	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	50,1	47,4	44,3	42,7	41,1	39,4	37,9	11,2
5.	KAB TIMOR TENGAH UTARA	42,7	40,5	37,8	36,4	35,1	33,6	32,4	9,6
6.	KAB BELU	48,1	45,6	42,5	41,0	39,5	37,8	36,4	10,8
7.	KAB ALOR	39,3	37,3	34,8	33,6	32,3	31,0	29,8	8,8
8.	KAB LEMBATA	35,1	33,4	31,2	30,0	28,9	27,7	26,7	7,9
9.	KAB FLORES TIMUR	37,2	35,3	33,0	31,8	30,6	29,4	28,3	8,3
10.	KAB SIKKA	33,3	31,7	29,6	28,5	27,5	26,3	25,4	7,5
11.	KAB ENDE	27,5	26,3	24,5	23,6	22,8	21,8	21,0	6,2
12.	KAB NGADA	21,3	20,5	19,1	18,4	17,8	17,0	16,4	4,8
13.	KAB MANGGARAI	36,8	35,0	32,6	31,5	30,3	29,0	28,0	8,3
14.	KAB ROTE NDAO	39,8	37,8	35,3	34,0	32,7	31,4	30,2	8,9
15.	KAB MANGGARAI BARAT	36,2	34,4	32,1	31,0	29,8	28,6	27,5	8,1
16.	KAB SUMBA TENGAH	39,5	37,5	35,0	33,7	32,5	31,1	30,0	8,9
17.	KAB SUMBA BARAT DAYA	44,3	42,0	39,2	37,8	36,4	34,9	33,6	9,9
18.	KAB NAGEKEO	24,9	23,8	22,2	21,5	20,7	19,8	19,1	5,6
19.	KAB MANGGARAI TIMUR	43,7	41,4	38,7	37,3	35,9	34,4	33,1	9,8
20.	KAB SABU RAIJUA	36,9	35,1	32,7	31,6	30,4	29,1	28,1	8,3
21.	KAB MALAKA	47,7	45,2	42,2	40,6	39,1	37,5	36,1	10,7
22.	KOTA KUPANG	29,9	28,5	26,6	25,7	24,7	23,7	22,8	6,7
	NUSA TENGGARA TIMUR	37,9	35,5	33,1	31,9	30,7	29,5	28,38	8,4

Catatan : target per kabupaten kota 2024,2025 dan 2045 merupakan hitungan "estimasi" dari target yg ditetapkan BAPPENAS



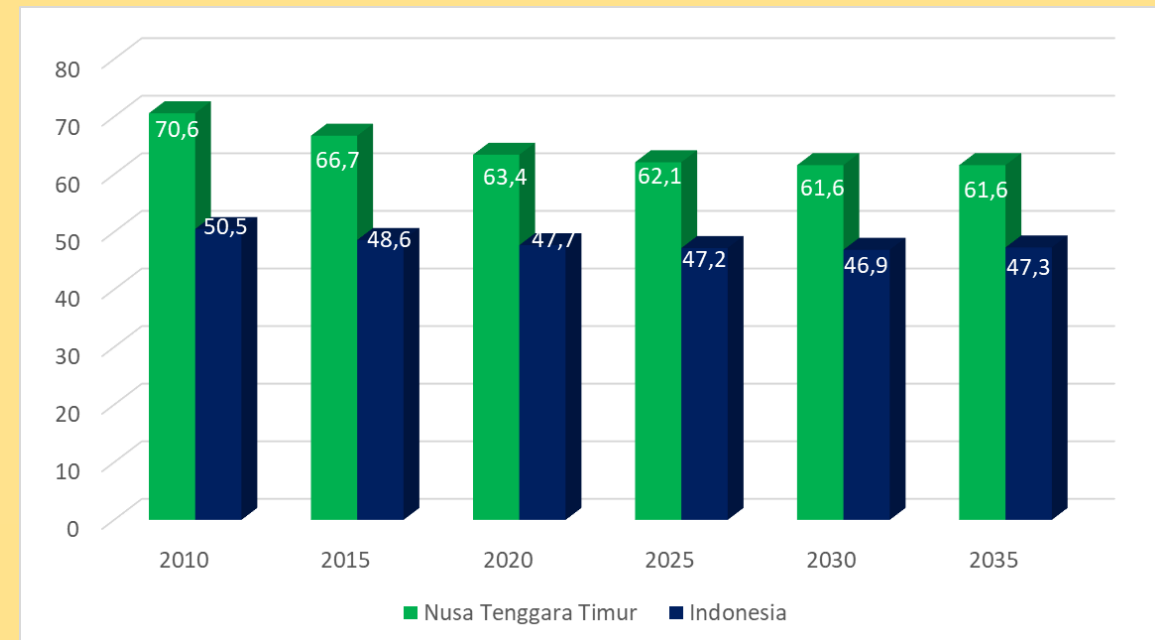
ASPEK DAYA SAING DAERAH

Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) Provinsi NTT Tahun 2015-2018



Sumber: Kajian Indeks Modal Manusia dan Peranannya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2018

Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, 2010-2035



Sumber: BPS NTT, 2023



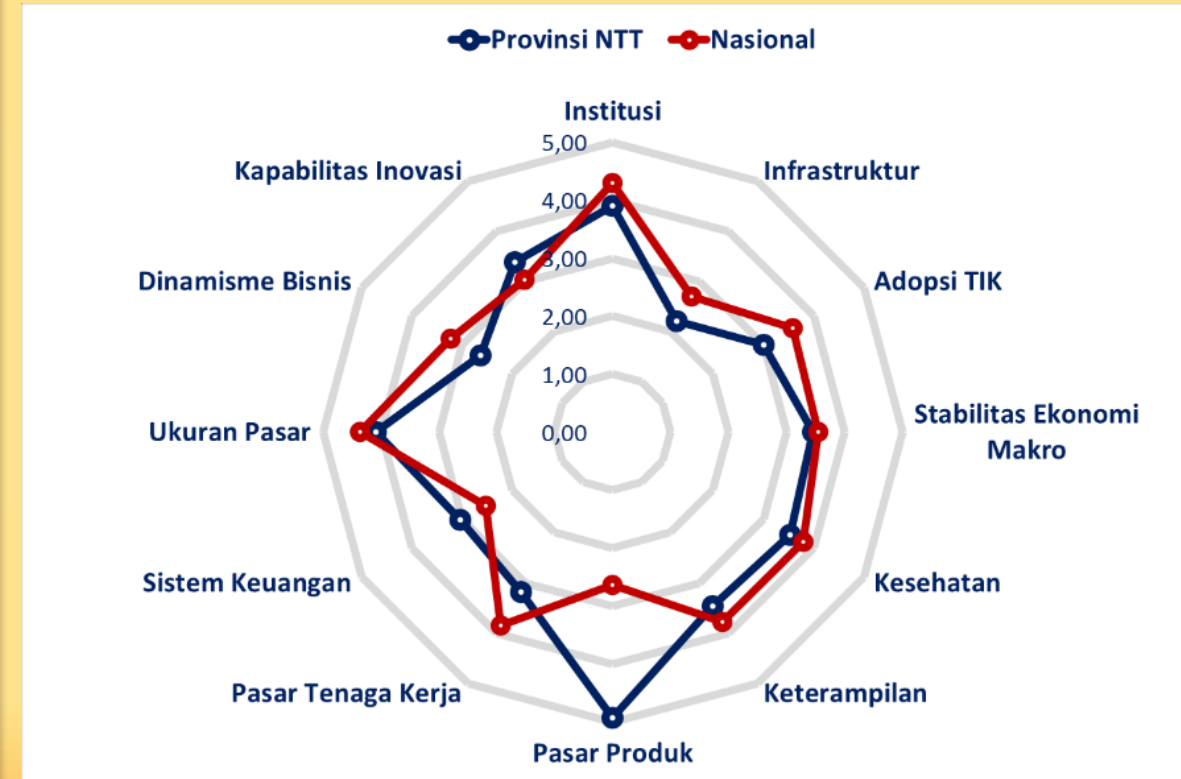
ASPEK DAYA SAING DAERAH

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi NTT Tahun 2019-2023



Sumber: BRIN, 2024

Komponen IDSD Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2023

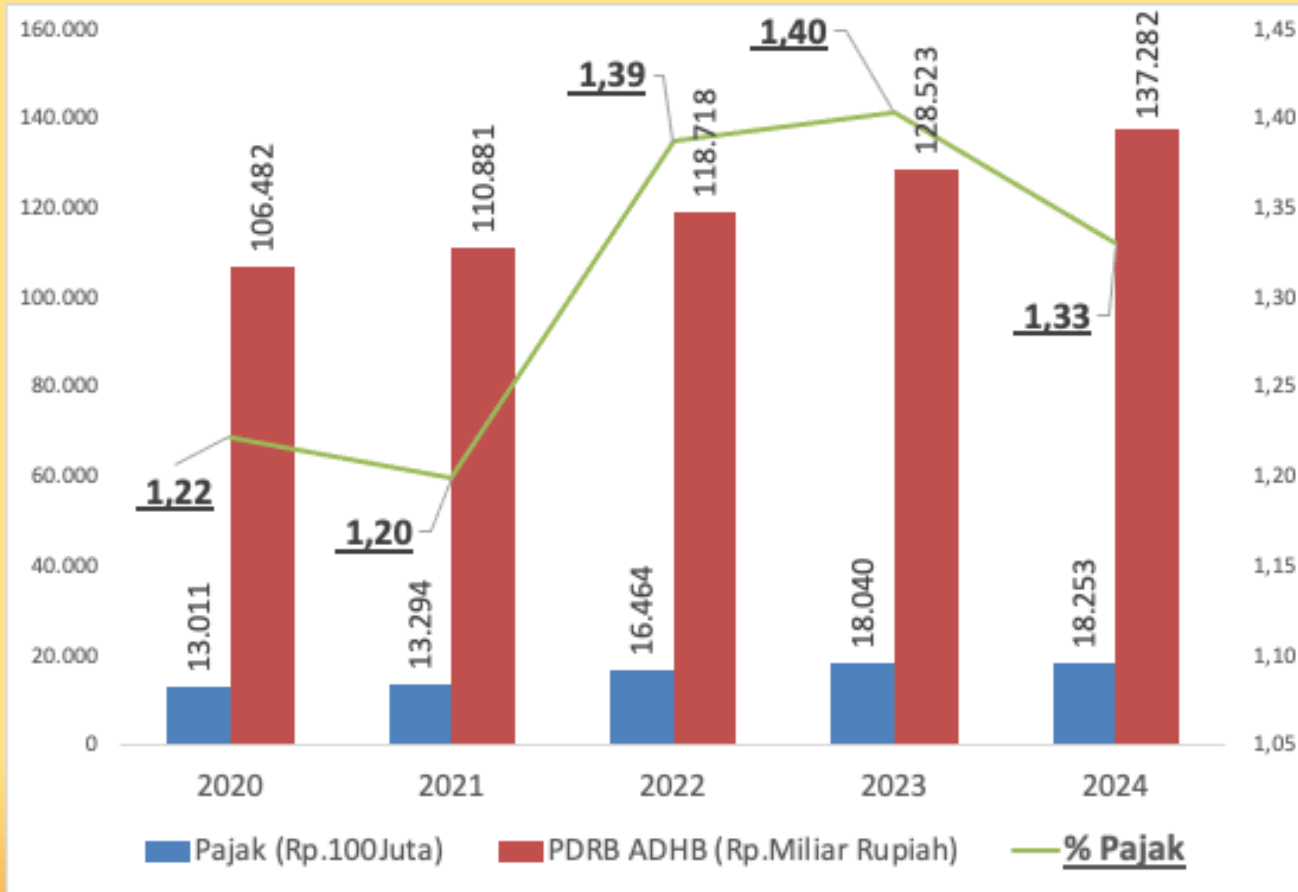


Sumber: BRIN, 2024



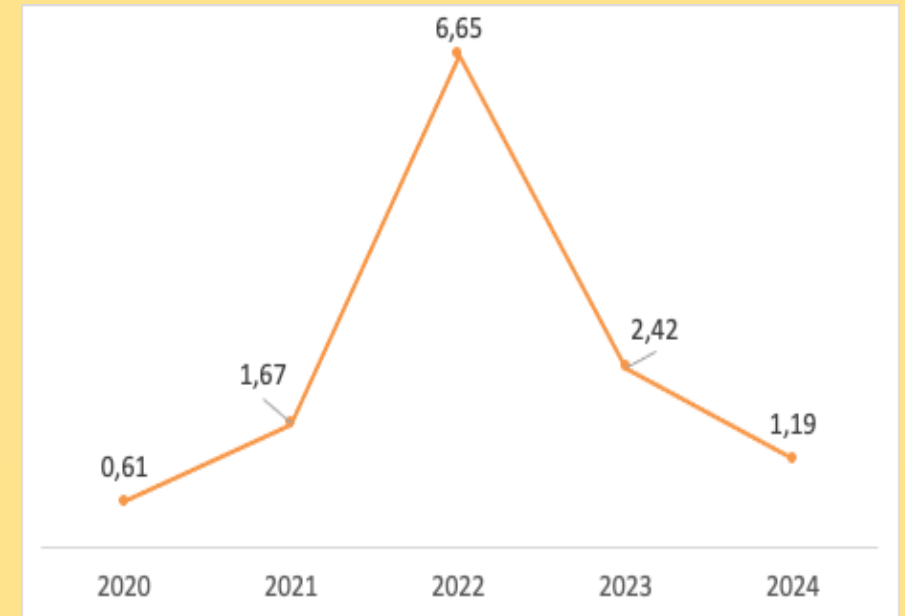
TINGKAT INFLASI DAERAH

Rasio Penerimaan Pajak Seluruh Pemerintah Daerah terhadap PDRB di NTT Tahun 2020-2024



Sumber: BPS dan Kemenkeu, 2025 (diolah)

Tingkat Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025 diolah



GAMBARAN KEUANGAN DAERAH - PROYEKSI BELANJA DAERAH RPJMD 2025 - 2029

Uraian	Rata-rata Pertumbuhan tahunan 2019-2023	Proyeksi pertumbuhan tahunan 2025-2029
2	3	4
BELANJA	-5,02%	0,63%
Belanja Operasi	-5,45%	0,83%
Belanja Pegawai	-0,23%	2,50%
Belanja Barang dan Jasa	-2,03%	0,04%
Belanja Bunga	46,71%	-36,91%
Belanja Hibah	-22,06%	0,05%
Belanja Bantuan Sosial	-4,44%	0,04%
Belanja Modal	-8,95%	0,01%
Belanja Modal Tanah	103,63%	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,49%	0,03%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,33%	0,01%
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-22,81%	0,02%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-30,24%	0,01%
Belanja Tidak Terduga	-43,87%	0,01%
Belanja Tidak Terduga	-43,87%	0,01%
Belanja Transfer	3,61%	0,06%
Belanja Bagi Hasil	3,71%	0,07%
Belanja Bantuan Keuangan	37,38%	0,01%



GAMBARAN KEUANGAN DAERAH - PROYEKSI BELANJA DAERAH

RANTEK RPJMD 2025 - 2029

Uraian	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
BELANJA	5.208.782.059.928	5.248.333.934.231	5.289.105.986.493	5.331.180.239.265	5.374.193.586.829
Belanja Operasi	3.883.478.343.116	3.922.484.891.250	3.962.711.303.021	4.004.239.600.780	4.046.706.678.612
Belanja Pegawai	1.951.250.828.820	2.000.032.099.541	2.050.032.902.029	2.101.283.724.580	2.153.815.817.695
Belanja Barang dan Jasa	1.527.553.379.831	1.528.164.401.183	1.528.775.666.943	1.529.387.177.210	1.529.998.932.081
Belanja Bunga	47.206.923.483	36.644.554.839,767	26.082.186.186,684	15.571.351.440,601	4.717.694.045,000
Belanja Hibah	336.378.216.755	336.546.405.864,228	336.714.679.067,160	336.883.036.406,694	337.051.477.924,897
Belanja Bantuan Sosial	21.088.994.224	21.097.429.822,490	21.105.868.794,419	21.114.311.141,937	21.122.756.866,394
Belanja Modal	513.235.581.392	513.308.907.100,58	513.382.245.546,51	513.455.596.732,75	513.528.960.661,96
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.232.502.350	50.247.572.100,841	50.262.646.372,471	50.277.725.166,383	50.292.808.483,933
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	340.684.196.173,116	340.718.264.592,733	340.752.336.419,193	340.786.411.652,835	340.820.490.294,000
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	119.556.496.758,048	119.580.408.057,400	119.604.324.139,011	119.628.245.003,839	119.652.170.652,840
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.762.386.110,990	2.762.662.349,601	2.762.938.615,836	2.763.214.909,698	2.763.491.231,189
Belanja Tidak Terduga	88.098.028.016,91	88.106.837.819,71	88.115.648.503,49	88.124.460.068,34	88.133.272.514,35
Belanja Tidak Terduga	88.098.028.016,910	88.106.837.819,711	88.115.648.503,493	88.124.460.068,344	88.133.272.514,350
Belanja Transfer	723.970.107.403,22	724.433.298.060,55	724.896.789.422,32	725.360.581.683,96	725.824.675.041,03
Belanja Bagi Hasil	711.653.586.607,966	712.116.161.439,261	712.579.036.944,196	713.042.213.318,210	713.505.690.756,867
Belanja Bantuan	12.316.520.795,250	12.317.136.621,290	12.317.752.478,121	12.318.368.365,745	12.318.984.284,163



PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2030

URAIAN	BASELINE	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH				
		TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	5.219.986.855.755	5.345.886.338.434	5.393.628.154.916	5.451.855.869.112	5.511.270.057.819	5.639.813.593.161
Pendapatan Asli Daerah	1.923.350.420.755	1.783.602.404.269	1.838.284.312.678	1.894.707.998.476	1.952.931.970.428	2.013.016.838.017
Pajak daerah	1.567.588.247.801	1.612.573.538.115	1.658.849.777.342	1.706.454.012.017	1.755.424.351.802	1.805.800.000.000
Retribusi daerah	218.587.260.975	26.995.208.576	28.199.194.879	29.456.878.970	30.770.655.772	32.143.027.020
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	62.519.178.857	65.645.137.800	68.927.394.690	72.373.764.434	75.992.452.646	79.792.075.278,42
Lain-lain PAD yang sah	74.655.733.122	78.388.519.778	82.307.945.767	86.423.343.055	90.744.510.208	95.281.735.718,37
Dana Perimbangan	3.296.636.435.000	3.561.718.097.991	3.554.759.955.890	3.556.545.358.314	3.557.716.354.926	3.626.155.189.414
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000	3.561.718.097.991	3.554.759.955.890	3.556.545.358.314	3.557.716.354.926	3.626.155.189.414, 15
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya						
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	565.836.174	583.886.348	602.512.322	621.732.465	641.565.730
Hibah	-	565.836.174	583.886.348	602.512.322	621.732.465	641.565.730,45
Dana darurat						
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)						
Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)						
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya						
Pendapatan Lainnya						
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya						

Sumber: Badan Keuangan Daerah 2025, (diolah)



RANCANGAN AWAL
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025 - 2029



VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Awal
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025-2029

NASIONAL

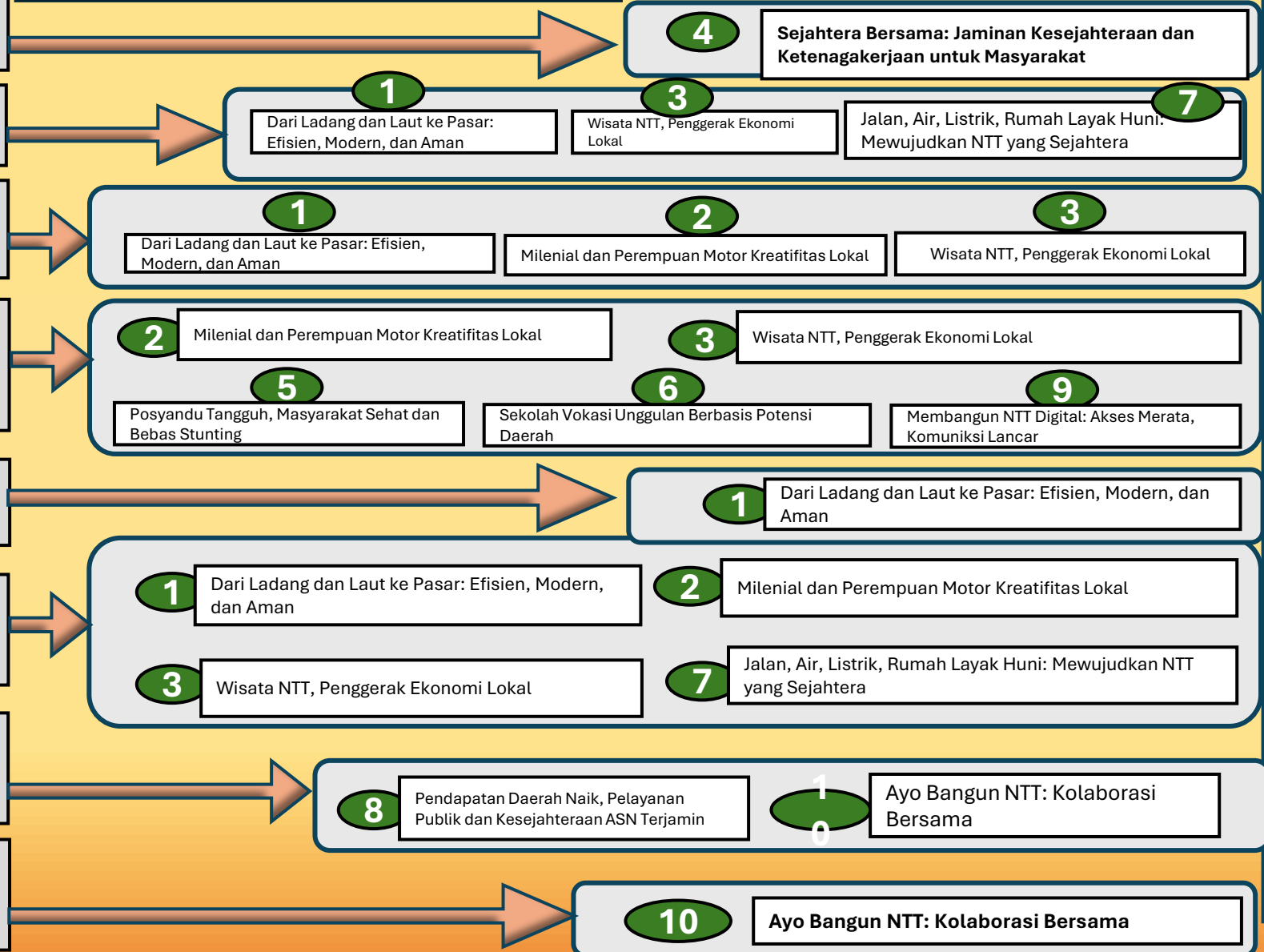
PEMETAAN ASTA CITA DAN DASA CITA

NTT

ASTA CITA

DASA CITA

- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur



VISI, MISI DAN PROGRAM Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2025-2029

VISI

**NTT Maju, Sehat,
Cerdas, Sejahtera,
dan Berkelanjutan**

MISI

- ▶ Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)
- ▶ Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses (SEHAT)
- ▶ Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS)
- ▶ Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)
- ▶ Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)



" AYO BANGUN NTT "

PROGRAM : TUJUH PILAR

1. Pilar Ekonomi Berkelanjutan
2. Pilar Pemberdayaan Komunitas
3. Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan
4. Pilar Kesehatan
5. Pilar Pendidikan
6. Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia
7. Pilar Kolaborasi

PROGRAM PRIORITAS

**Dasa Cita
'Ayo Bangun NTT'**



TRANSFORMASI NTT: AYO BANGUN NTT

VISI

NTT Maju, Sehat, Cerdas,
Sejahtera, dan Berkelanjutan

MISI

Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)

Memperluas pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses (SEHAT)

Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS)

Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)

PROGRAM (7 PILAR)

1 PILAR EKONOMI BERKELANJUTAN

- A. Memajukan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah
- B. Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha
- C. Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia
- D. Memastikan seluruh masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

2 PILAR PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

- A. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan
- B. Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi desa
- C. Digitalisasi, kolaborasi, dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi

3 PILAR PEMERATAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

- A. Membangun jalan, sumber daya air, ketersediaan air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama, penerapan infrastruktur hijau dan biru (green and blue infrastructure), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim
- B. Pembangunan infrastruktur digital untuk memperluas akses internet dan komunikasi
- C. Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah

4 PILAR KESEHATAN

- A. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan pentahelix
- B. Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan
- C. Memastikan seluruh masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS
- D. Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan

5 PILAR PENDIDIKAN

- A. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan berkualitas
- B. Insentif pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu, serta tenaga pendidik di daerah perifer
- C. Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah
- D. Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non-formal

6 PILAR REFORMASI BIROKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

- A. Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional, proaktif, dan melayani
- B. Memperkuat sumber pendapatan daerah
- C. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu penggerak ekonomi
- D. Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak - hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor

7 PILAR KOLABORASI

- A. Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi 'Keluarga Besar NTT' untuk membangun daerah
- B. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk pembangunan di Provinsi NTT



PILAR DAN PROGRAM PRIORITAS

PRIORITAS DAERAH : 7 PILAR

1. Pilar Ekonomi Berkelanjutan
2. Pilar Pemberdayaan Prioritas
3. Pilar Pemerataan
Infrastruktur Berkelanjutan
4. Pilar Kesehatan
5. Pilar Pendidikan
6. Pilar reformasi Birokrasi dan
Hak Asasi Manusia
7. Pilar Kolaborasi

PROGRAM PRIORITAS : DASA CITA

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman
2. Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal
3. Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal
4. Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat
5. Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting
6. Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan
7. Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera
8. Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin
9. Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar
10. Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama

- Keselarasan Visi, Misi RPJPD dengan Visi, Misi RPJPN



NO	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025-2045
VISI		
	NKRI yang bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045
Sasaran Visi		
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat	Daya Saing Daerah yang meningkat
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission



Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 Dengan VISI MISI RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045

Visi RPJMD

"NTT maju sehat cerdas, sejahtera dan berkelanjutan"

Visi RPJPD

"Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045"

MISI

1

Memastikan Infrastruktur Berkelanjutan Demi Mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah Yang Berdaya Saing (Maju)

2

Memperluas Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Sosial Yang Lebih Inklusif, Terjangkau Dan Mudah Di Akses (Sehat)

3

Menghadirkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata, Partisipatif Dan Tepat Sasaran (Cerdas)

4

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, Serta Kualitas Hidup Yang Berkeadilan Dan Madani Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat (Sejahtera)

5

Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Manusia Yang Bijak Serta Pemenuhan HAM Untuk Menciptakan Masa Depan Yang Inklusif

Membangun Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dan terlindungi Hak Dasarnya

1

Membangun Ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

2

Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif

3

Meningkatkan Supremasi Hukum yang menjamin Keadilan, Kepastian, Stabilitas Ekonomi dan Demokrasi

4

Mewujudkan Pembangunan yang Inklusif dan Berketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

5

MISI



Arah Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2025 – 2029

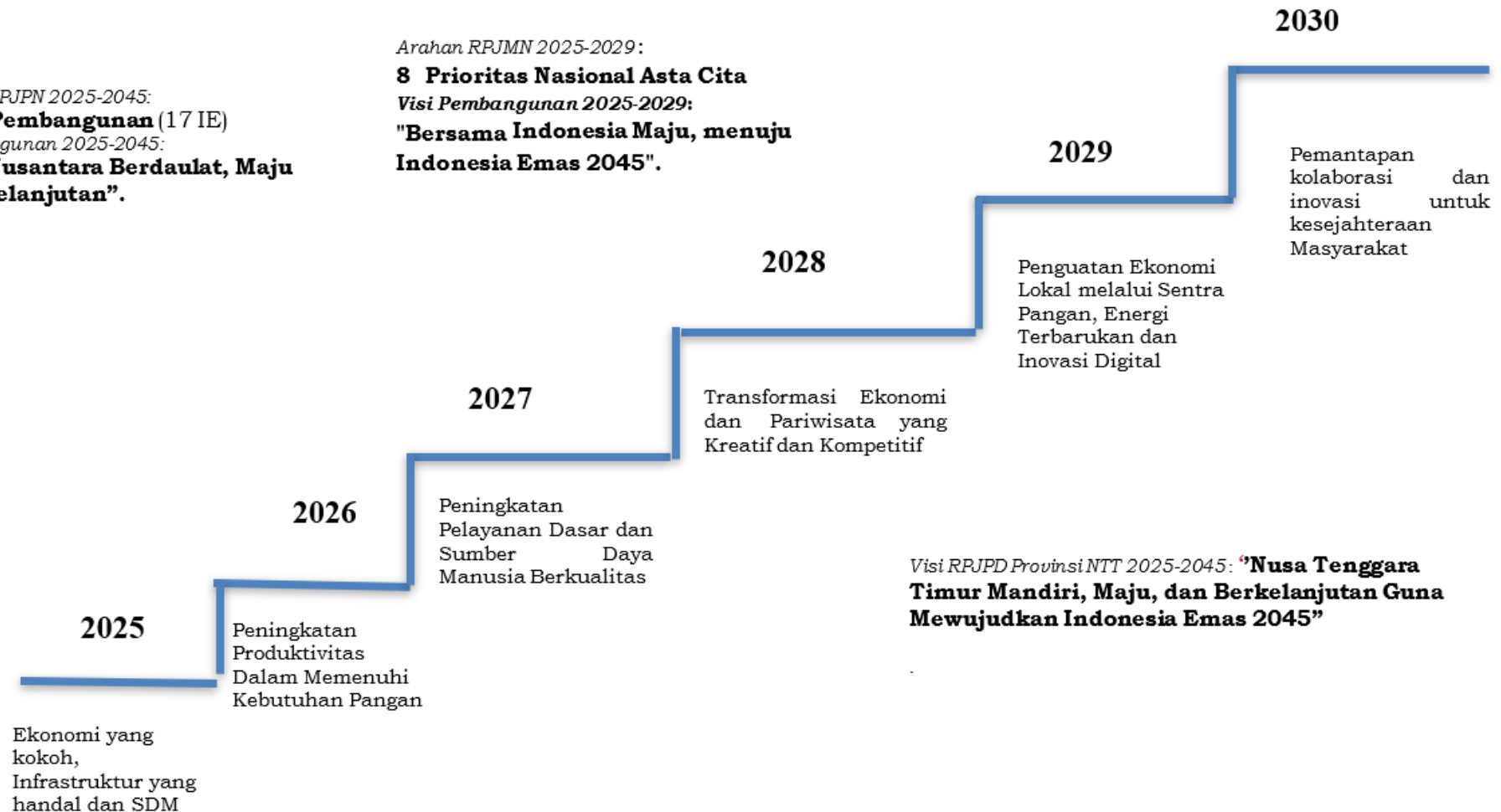
Arahahan RPJPN 2025-2045:
17 Arah Pembangunan (17 IE)
Visi Pembangunan 2025-2045:
**"Negara Nusantara Berdaulat, Maju
dan Berkelanjutan"**.

Arahana RPJMN 2025-2029:

8 Prioritas Nasional Asta Cita

Visi Pembangunan 2025-2029:

**"Bersama Indonesia Maju, menuju
Indonesia Emas 2045"**.





Penahapan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2030

Arah Kebijakan				
Tahap I (2026)cek tema RKPD 2026	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tema: Pemerataan Pembangunan, Pelayanan Dasar dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. Arah Kebijakan: • Pembangunan dan perbaikan infrastruktur penunjang Pelayanan Dasar • Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel • Penataan ruang yang sehat, aman dan resilien terhadap bencana • Pemanfaatan teknologi dalam Pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi Masyarakat • Kolaborasi dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan pengembangan industri • Perluasan lapangan kerja yang inklusif dan jaminan sosial bagi Masyarakat	Tema: Peningkatan Pelayanan Dasar dan Sumber Daya Manusia Berkualitas Arah Kebijakan: • Peningkatan infrastruktur penunjang Pelayanan Dasar hingga wilayah terpencil • Pengembangan pelayanan dasar berbasis digital • Optimalisasi regulasi dan kebijakan daerah • SDM Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang merata dan berkompeten • Peningkatan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas • Peningkatan pendapatan daerah melalui sumber-sumber potensial • Peningkatan SDM, pemasaran dan tata kelola pariwisata • Penataan ruang konservasi dan ekosistem spesies yang dilindungi	Tema: Transformasi Ekonomi dan Pariwisata yang Kreatif dan Kompetitif Arah Kebijakan: • Peningkatan SDM kewirausahaan dan pencari kerja yang produktif dan kompeten • Pemberdayaan Masyarakat dalam ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis digital • Penguatan kebijakan investasi dan perlindungan tenaga kerja • Kolaborasi dan kemitraan dalam pengembangan industri dan ekonomi kreatif berbasis produk unggulan daerah • Pengembangan infrastruktur sumber daya air dan energi baru terbarukan • Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang tanggap terhadap bencana dan perubahan iklim	Tema: Penguatan Ekonomi Lokal melalui Sentra Pangan, Energi Terbarukan dan Inovasi Digital Arah Kebijakan: • Pengembangan sentra pangan lokal • Mengoptimalkan aplikasi digital dalam pengembangan koperasi dan UMKM • Pendampingan dan akses pembiayaan yang inovatif dalam kewirausahaan. • Optimalisasi pengelolaan EBT dengan melibatkan Masyarakat lokal • Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan lindung	Tema: Pemantapan kolaborasi dan inovasi untuk kesejahteraan Masyarakat Arah Kebijakan: • Pemenuhan akses terhadap Pelayanan Dasar. • Pengembangan ekonomi lokal, industri dan pariwisata • Penguatan kemitraan dalam pemberdayaan Masyarakat yang khususnya pemuda, wanita dan disabilitas. • Pemantapan infrastruktur digital untuk akses informasi, layanan publik dan peluang ekonomi yang lebih luas. • Pemantapan pelestarian sumber daya alam, budaya, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.



RANCANGAN AWAL
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025 - 2029



PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Rancangan Awal
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025-2029



Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB per kapita	(Rp Juta)	23,52	24.57-24,85	24.71-25,25	24,85– 25,65	24.99- 26.05	25.13- 26.45	25.27-26.85
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	<u>N.A</u>	2,8	2,67	2,75	2,82	2,9	2,97
3	Indeks Modal Manusia	poin	<u>N.A</u>	0,47	0,463	0,456	0,449	0,51	0,52
4	Tingkat Kemiskinan	%	19,02	18,81 - 19,36	18.12-18.74	17,43 – 18,12	16,74 – 17,50	16,05 – 16,88	15,36 – 16,26
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73	3.95-4,75	4,43-5,01	4.78-5.65	5.13-6.29	5.48-6.93	5.83-7.53
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,49 - 2,99	2,39 – 2,94	2,30 – 2,89	2,20 – 2,84	2.10-2,79	2,00 – 2,74
7	Rasio Gini		0,316	0,319	0,3152	0,3148	0,3144	0,319	0,314
8	Penurunan intensitas emisi GRK (kumulatif)	%	<u>N.A</u>	19,85	21,25	22,65	24,05	25,45	26,85
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	poin	74,42	80,02	80,18	80,35	80,52	80,69	80,85
10	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	poin	<u>N.A</u>	60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
11	Indeks Ekonomi Hijau	poin	<u>N.A</u>	67,04	67,86	68,68	69,5	70,32	71,14



INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	skor	70,91	71,30	71,80	72,40	73,10	73,70	74,00
2	Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan	%	12,49	11,85	11,22	10,58	9,94	9,30	8,67
3	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	68,00	68,61	69,22	69,83	70,46	71,09	71,72
5	Cakupan layanan Air Minum Layak	%	88,55	88,75	88,95	89,15	89,35	89,55	89,75
6	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	0,00	34,36	37,42	40,92	44,21	47,48	50,77
7	Rasio Elektrifikasi	%	96,25	97,30	97,4	97,5	97,7	97,90	98,11
8	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	0,00	2,50	4,88	7,38	9,75	12,13	14,50
9	Persentase timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	0,00	5,00	9,25	13,5	17,75	22,00	26,25
10	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	% RT	0,00	15,00	19,25	23,50	27,75	32,00	36,25
11	Penurunan Emisi GRK	ribu	2,17	2,11	2,17	2,52	2,54	2,60	2,65
12	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	poin	131,85	186,87	185,48	184,09	182,70	181,32	179,93
13	Intensitas energi primer	ribu CO2Eq	80,32	79,51	78,70	77,89	77,08	76,27	75,45
14	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	poin		0,47	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51
15	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	poin	74,42	80,02	80,18	80,35	80,52	80,69	80,85
16	Indeks kemahalan konstruksi	poin	93,58	92,78	92,22	91,67	91,11	90,56	90,00
17	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,41	5,41	10,41	15,41	20,41	25,41	30,41
18	Konsumsi Listrik per kapita	kwh	211,22	216,02	220,82	225,62	230,42	235,22	240,02
19	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,46	1,44	1,43	1,41	1,39	1,37	1,36
21	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	122,00	124,00	126,00	128,00	130,00	132,00	134,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	PDRB Per Kapita	Rp, Juta	23,52	24,57	24,71	28,31	31,91	35,1	39,11
2	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	86,17	86,17	86,18	86,19	86,20	86,21	86,22
3	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,11	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80	3,88
4	Tingkat Kemiskinan	%	19,02	15,32- 15,82	18,12- 18,74	17,77	17,12	16,46	15,81
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73	3,95-4,75	4,43-5,01	4,78-5,65	5,13-6,29	5,48-6,93	5,83-7,53
6	Indeks Gini		0,316	0,319	0,3152	0,3148	0,3144	0,314- 0,319	0,314
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,02	2,49 - 2,99	2,39 - 2,94	2,30 - 2,89	2,20 - 2,84	2,10-2,79	2,00 - 2,74
8	Indeks Modal Manusia/IPM	Poin	67,39	0,47	0,463	0,456	0,449	0,51	0,52
9	Proporsi jumlah IKM pada Level Provinsi	%		7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
10	Inklusi Keuangan (%)	%		92,07	92,41	92,76	93,11	93,45	93,80
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
13	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	indeks		60,1 - 60,14	60,30	60,50	60,70	60,90	61,11
14	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	Poin	55,86	56,30	56,84	57,36	57,89	58,27	57,86
15	Indeks Perlindungan anak	indeks	48,45	48,56	48,67	48,78	48,90	49,01	49,12
16	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Level provinsi (%)	%		7,45	7,55	7,64	7,74	7,84	7,94
17	Proporsi jumlah Industri kecil dan Menengah pada Level provinsi (%)	%		0,34	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44
19	Rasio Koperasi Produktif Provinsi NTT (%)	%	22,00	26,00	27,00	28,00	30,00	35,00	40,00
20	Tingkat Digitalisasi Koperasi	%	50,00	51,00	53,00	55,00	56,00	58,00	60,00
21	Persentase Koperasi Aktif dan Berkinerja Baik (%)	%	77,81	77,63	75,00	77,00	80,00	81,00	85,00
23	Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks	98,34	99,96	101,58	103,2	104,82	106,44	108,08
25	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	37,9 (2023 SKI)	33,1	31,9	30,70	29,5	28,38	27,1



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	tahun	8,02	8,61 - 8,62	8,49	8,38	8,27	8,15	8,04
27	Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun		13,47-13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81
28	Skor Kemampuan Literasi	%							
	- SMA		63,34	63,94	64,54	65,14	65,74	66,34	66,94
	- SMK		58,53	59,83	61,13	62,43	63,73	65,03	66,33
	- SDLB		52,35	53,95	55,55	57,15	58,75	60,35	61,95
	- SMPLB		61,05	61,55	62,05	62,55	63,05	63,55	64,05
	- SMALB		57,22	57,72	58,22	58,72	59,22	59,72	60,22
29	Skor Kemampuan Numerasi	%							
	- SMA		53,89	55,49	57,09	58,69	60,29	61,89	63,49
	- SMK		50,88	53,08	55,28	57,48	59,68	61,88	64,08
	- SDLB		47,59	48,29	48,89	49,49	50,09	50,69	51,29
	- SMPLB		55,03	55,28	55,53	55,78	56,03	56,28	56,53
	- SMALB		52,94	53,44	53,94	54,44	54,94	55,44	55,94
30	Indeks SPM Pendidikan	%	58,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	%		28,42	30,62	32,81	35,01	37,21	39,40
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	84,25	86,46-86,51	86,87-86,94	87,28-87,37	87,69-87,80	88,10-88,23	88,51-88,67
33	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	poin	54,18-54,22	51,09-51,11	51,65-51,69	52,22-52,28	52,78-52,86	53,34-53,45	67,34-67,45
35	Angka Kematian Ibu	per 100,000 KH	103,00	101,00	99,00	97,00	95,00	93,00	91,00
36	Angka Kematian Bayi	per 1,000 KH	7,85	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00
37	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	rata-rata anak	2,71	2,70	2,67	2,63	2,60	2,56	2,53
38	Cakupan Penemuan Kasus TBC ((Notifikasi Kasus TBC)	%	56	59	68	72	77	81	85
39	Kapasitas air baku	m3/detik		0,04	0,44	0,85	1,25	1,66	2,07
40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%		10,53	10,60	10,68	10,76	10,85	10,92



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
III	ASPEK DAYA SAING								
1	Rasio PDRB Industry Pengolahan	%	2,46	1,31	1,36 - 1,41	1,40 - 1,48	1,45 - 1,55	1,50 - 1,62	1,55 - 1,70
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,72	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	100
3	proporsi PDRB sektor pariwisata	%	7,77	7,77	7,80	7,85	7,90	7,95	80
4	Rasio Kewirausahaan daerah (%)	%		1,35	1,48	1,61	1,74	1,87	2,01
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,50	78,60	79,70	80,80	81,90	83,00	84,10
6	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%		73,63	74,45	75,27	76,09	76,91	77,73
7	Indeks Inovasi Daerah	indeks	50,10	62,55	62,57	62,59	63,05	63,07	63,09
8	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	indeks		67,04	67,86	68,68	69,50	70,32	71,14
9	Indeks Ekonomi Biru Daerah	indeks		60,41	69,05	77,69	86,33	94,97	103,61
10	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
11	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	46,88	50,76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
12	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	%		2,36	2,48	2,60	2,72	2,84	2,96
13	Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	poin		5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
14	Indeks Masyarakat Digital	poin	42,32	47,21	52,10	56,99	61,88	66,77	71,66
15	Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	%		11,49	11,21	10,93	10,65	10,37	10,09
16	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto	%		46,09	46111,00	46132,00	46153,00	46174,00	46195,00
17	Persentase desa mandiri	%	1,78	2,42	3,06	3,69	4,33	4,97	5,61
18	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%		1,04	1,22	1,39	1,57	1,74	1,92
19	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	26,68	27*	28,4	29,8	31,2	32,6	34,0
20	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%		2,29	2,47	2,66	2,84	3,02	3,21
21	rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	30,21	30,50	31,00	31,50	32,00	32,50	33,00
22	Tingkat Inflasi	%		3,30	3,27	3,24	3,21	3,18	3,15
23	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%		28,68	31,72	34,76	37,80	40,84	43,88
24	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	%		0,72	1,04	1,36	1,68	2,00	2,32



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
25	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	Rp		562363,8 6	782933,4 3	1003503, 00	1224072, 57	1444642, 14	1665211,7 1
26	Total Kredit/PDRB (%)	%		36,3	38,3	40,4	42,4	44,5	46,5
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	poin		70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	82,50
2	Persentase penegakan hukum peraturan daerah	poin		70,00	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,87	4,40	4,43	4,46	4,49	4,52	4,10
4	Indeks Pemerintah Digital	poin			1,70	1,70	1,90	1,90	2,00
5	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,56	3,66	3,73	3,80	3,87	3,94	4,00
6	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	level	94,30	94,39	94,47	94,56	94,64	94,73	94,82
7	Indeks integritas nasional	poin		65,65	66,31	66,97	67,63	68,29	68,95
8	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	%		60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00
9	Indeks Demokrasi Indonesia	level	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
10	Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%		64,03	64,88	65,73	66,58	67,43	68,28
11	Indeks Daya Saing Daerah	POIN	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,46	3,47
12	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%		96,28	96,44	96,60	96,76	96,92	97,08
13	Indeks Kapabilitas APIP	Level	3,09	3,12	3,17	3,22	3,25	3,27	3,30
14	Opini BPK	Level	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Poin	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	
16	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	%		15,00	16,5	18,00	19,5	21,00	22,5
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	68,86	70,12	70,93	71,75	72,56	73,38	74,19
18	Rasio Konektivitas	poin	0,66	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73
19	Indeks Pembangunan Olahraga	poin	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40
20	Indeks EPSS	Nilai	2,12	2,25	2,25	2,40	2,40	2,60	2,60
21	Indeks keamanan informasi	level	479,00	479,00	480,00	482,00	483,00	485,00	487,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
A	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar								
I	URUSAN PENDIDIKAN								
1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun		13,47- 13,48	13,54	13,60	13,67	13,75	13,81
2	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	tahun	8,02	8,61 - 8,62	8,49	8,38	8,27	8,15	8,04
3	Skor Kemampuan Literasi	%							
	- SMA		50,28	54,28	58,28	62,28	66,28	70,28	74,28
	- SMK		44,40	48,40	52,40	56,40	60,40	64,40	68,40
	- SLB		38,10	39,10	40,10	41,10	42,10	43,10	44,10
4	Skor Kemampuan Numerasi	%							
	- SMA		49,60	52,60	55,60	58,60	61,60	64,60	67,60
	- SMK		44,29	47,29	50,29	53,29	56,29	59,29	52,29
	- SLB		19,05	20,05	21,05	22,05	23,05	24,05	25,05
5	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	0,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	iklim keamanan satuan pendidik	%							
	- SMA		71,31	71,81	72,31	72,81	73,31	73,81	74,31
	- SMK		69,38	69,78	70,28	70,78	71,28	71,78	72,28
	- SLB		69,01	69,51	70,01	70,51	71,01	71,51	72,01
7	iklim kebhinekaan	%							
	- SMA		75,31	75,81	76,31	76,81	77,31	77,81	78,31
	- SMK		73,01	73,51	74,01	74,51	75,01	75,51	76,01
	- SLB		6781,00	68,31	68,81	69,31	69,81	70,31	70,81
8	iklim Inklusivitas	%							
	- SMA		58,67	59,17	59,67	60,17	60,67	61,17	61,67
	- SMK		56,86	57,36	57,86	58,36	58,86	59,36	59,86
	- SLB		65,20	65,70	66,20	66,70	67,20	67,70	68,20



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK	%	94,49	94,99	95,49	95,99	96,49	96,99	97,49
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	%	75,92	76,42	76,92	77,42	77,92	78,42	78,92
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas	%	54,35	54,85	55,35	55,85	56,35	56,85	57,35
II	URUSAN KESEHATAN								
1	Usia Harapan Hidup (UHH)		71,83	72,05	72,35	72,65	72,94	73,24	73,54
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM								
1	Indeks Layanan Infrastruktur Ke-PU-an								
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT								
1	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%	46,88	50,76	53,22	55,68	58,14	60,60	63,07
V	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Indeks Penvelenggaraan Trantibumlinmas								
2	Indeks Ketahanan Daerah	point	0,41	5,41	10,41	15,41	20,41	25,41	30,41
VI	URUSAN SOSIAL								
1	Indeks Kesejahteraan Sosial								
B	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar								
I	URUSAN TENAGA KERJA								
1	persentase penanganan tenaga kerja AKAD dan AKAN yang bermasalah	%	80,00	82,00	85,00	90,00	92,00	95,00	96,00
2	persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan	%	73,94	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00
II	URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,407 - 0,405	0,396	0,385	0,375	0,364	0,354	0,195 - 0,174
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		93,77	94,03	94,29	94,55	94,82	95,09	95,36
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		48,45	48,56	48,67	48,78	48,90	49,01	49,12
4	Cakupan Kabupaten Kota Layak Anak	%	9,00	13,00	18,00	22,00	27,00	32,00	36,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Jumlah aplikasi layanan publik yang terintegrasi (SPLP)	Jumlah Aplikasi	Indikator Baru	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	15,00
8	Jumlah PD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Jumlah PD	0,00	0,00	12,00	24,00	31,00	41,00	41,00
9	Jumlah Aplikasi yang memanfaatkan pusat data Pemerintah Provinsi NTT	Jumlah Aplikasi	Indikator Baru	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00
10	Jumlah Area Blankspot yang telah diintervensi	Jumlah Desa	Indikator Baru	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
11	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Kominfo Yang bertalenta Digital	Jumlah orang	Indikator Baru	0,00	200,00	210,00	220,00	230,00	860,00
12	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi	Jumlah Layanan	Indikator Baru	0,00	6,00	7,00	8,00	10,00	10,00
XI	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	%	86,17	86,17	86,18	86,19	86,20	86,21	86,22
XII	URUSAN PENANAMAN MODAL								
1	Persentase realisasi Investasi	%	67,36	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
XIII	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,86	56,30	56,84	57,36	57,89	58,27	58,86
2	Indeks Partisipasi Olahraga	%	26,30	27,20	28,10	29,00	29,90	30,80	31,70
XIV	URUSAN STATISTIK								
1	Indeks EPSS	Nilai	2,12	2,25	2,25	2,40	2,40	2,60	2,60
2	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektorial	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
3	Tingkat Pemenuhan data sektoral	%	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
XV	URUSAN PERSANDIAN								
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKAMI)	%	23,00	38,00	40,00	43,00	46,00	50,00	50,00
2	Nilai Cyber Sekuriti Maturity (CSM)	Level	318,00	320,00	340,00	350,00	360,00	380,00	380,00
3	Presentase PD Yang memiliki keamanan Informasi	%	Indikator baru	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
XVI	URUSAN KEBUDAYAAN								
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		53,69	54,89	56,09	57,29	58,49	59,69	60,89
XVII	URUSAN PERPUSTAKAAN								



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	nilai	62,62	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50
XVIII	URUSAN KEARSIPAN								
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	nilai	60,19	65,00	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00
C	Urusan Pilihan								
I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	102,19	102,00	102,00	103,00	104,00	105,00	106,00
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	%	118,13	118,00	118,00	119,00	120,00	121,00	122,00
II	URUSAN PARIWISATA								
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,7	0,75	0,80	0,84	0,89	0,93	0,98
2	pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	4,50	2,58	3,13	3,27	3,35	3,46	3,57
3	lama tinggal wisatawan	hari	1,49	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2
4	Pertumbuhan pelaku ekraf	%	0,01	0,01	0,015	0,02	0,03	0,04	0,05
III	URUSAN PERTANIAN								
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	indeks	99,60	100,00	100,20	100,30	100,70	100,80	101,00
IV	URUSAN KEHUTANAN								
1	persentase tutupan lahan kritis	%	1,49	1,49	1,51	1,52	1,54	1,56	1,58
2	persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial	%	15,72	16,58	17,44	18,30	19,16	20,02	20,88
V	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
1	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	19,05	22,12	25,19	28,26	31,33	34,4	37,47
2	Rasio Elektrifikasi	%	96,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VI	URUSAN PERDAGANGAN								
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	12,80	12,90	13,00	13,10	13,20	13,30	13,50
2	persentase nilai ekspor non migas	%	95,27	96,00	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25
VII	URUSAN PERINDUSTRIAN								
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
2	persentase pelaku IKM yang mendapatkan fasilitas sertifikasi	%	100,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
VIII	URUSAN TRANSMIGRASI								
1	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	%	29,41	35,29	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71
D	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
I	Unsur Sekretariat Daerah								
1	Nilai Sakip Pemerintah Provinsi	point	63,68	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	81,00
2	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	75,63	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	84,00
II	Unsur Sekretariat DPRD								
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD								
III	Unsur Perencanaan								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	indeks	82,91	83,41	83,91	84,41	84,91	85,41	
IV	Unsur Keuangan								
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah								
V	Unsur Kepegawaian								
1	Indeks Profesionalitas ASN								
VI	Unsur Pendidikan dan Pelatihan								
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi dasar	%	88,33	90,08	91,83	93,58	95,33	97,08	98,83
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi manajerial	%	88,00	89,75	91,50	93,25	95,00	96,75	98,50
80,16	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi pemerintahan	%	80,16	81,91	83,66	85,41	87,16	88,91	90,66
4	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi sosial kultural	%	85,00	86,75	88,50	90,25	92,00	93,75	95,50
5	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi teknis	%	85,00	86,75	88,50	90,25	92,00	93,75	95,50
6	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi pengembangan kompetensi fungsional	%	66,67	67,42	69,17	70,92	72,67	74,42	76,17
VII	Unsur Penelitian dan Pengembangan								

[illegible]



RANCANGAN AWAL
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025 - 2029



PROGRAM PRIORITAS

Rancangan Awal
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025-2029



DASA CITA 1

DARI LADANG DAN LAUT KE PASAR: EFISIEN, MODERN, DAN AMAN

PENINGKATAN PRODUKSI PRODUKTIVITAS

- Share PDRB lapangan usaha pertanian
- Produksi pertanian
- Produktivitas Pertanian

Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Dinas
Pernakan, DKP, PUPR, Balai
Pusat

BUMDes, BUMD

Return on Asset (ROA) BUMDes, BUMD

BPMD, Biro Perekonomian
dan AP

KOPERASI, UKM, IKM

- Proporsi jumlah usaha kecil menengah non
pertanian level provinsi
- Proporsi jumlah IKM level provinsi

*Dinas Koperasi dan UKM,
Dinas Perindag*

REHABILITASI COOL STORAGE

Produksi Perikanan Tangkap
Produksi Perikanan Budidaya

Dinas Kelautan dan
Perikanan (DKP)

TEKNOLOGI, RISET & INOVASI, QUALITY CONTROL^t

- % petani menggunakan teknologi
- pemanfaatan hasil riset dan inovasi
- Produk pertanian yang melewati quality control dan sesuai
standar

Lembaga penelitian/kajian.
Akademisi, Laboratorium, BPOM,
RIBB

PROGRAM PENGEMBANGAN ONE VILLAGE, ONE PRODUCT (OVOP)

- Share PDRB Industri Pengolahan
- Produk unggulan kabupaten/kota yang dikembangkan sampai pada
tahap hilirisasi
- Jumlah transaksi produk unggulan daerah (antar pulau, ekspor)
- Neraca perdagangan

BPMD, Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Perindag, Perhubungan,
PUPR, ESDM, BKPM



MILENIAL DAN PEREMPUAN MOTOR KREATIVITAS LOKAL





WISATA NTT, PENGGERAK EKONOMI LOKAL

Pengembangan dan Pembangunan Destinasi pariwisata

1. Pengembangan Kawasan pariwisata Super prioritas, 2. pengembangan Kawasan pariwisata strategis provinsi, 3. pengembangan pariwisata rintisan

Penguatan Kelembagaan Pariwisata

Penguatan kapasitas SDM Pariwisata, penguatan kelembagaan pariwisata, data, dan monitoring

Pengembangan Industri Pariwisata

1) Pengembangan usaha ekonomi kreatif, 2) Pengembangan industry pariwisata (akomodasi, rumah makan, biro perjalanan, 3) Pengembangan MICE, 4) Akses permodalan

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1) Peningkatan citra dan branding pariwisata NTT, 2) Pemasaran berbasis digital, 3) Kolaborasi Pemasaran dengan Bali dan NTB, 4) Event dan atraksi Budaya, 5) Pelaksanaan event, 6) Keikutsertaan pada pameran

- Rasio PDRB Penyediaan akomodasi, makan dan minum
- Proporsi PDRB Ekonomi kreatif
- Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang)
- Jumlah Perjalanan wisata
- Jumlah kunjungan wisatawan
- Lama tinggal

Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Asosiasi,



SEJAHTERA BERSAMA: JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN UNTUK MASYARAKAT





POSYANDU TANGGUH, MASYARAKAT SEHAT DAN BEBAS STUNTING

Posyandu : Pemenuhan SPM

Terpenuhinya SPM Bidang Kesehatan

Deteksi dini resiko tinggi (bayi, anak, dewasa, ibu hamil dan lansia)

Ketersediaan sarana, prasarana, tenaga medis dan fasilitas kesehatan

KAMPANYE UNTUK PERUBAHAN MINDSET

Proaktif rebranding konvergensi layanan posyandu sebagai Upaya mendukung percepatan penurunan angka stunting, kematian ibu dan bayi, penyakit tidak menular, dan peningkatan perilaku hidup sehat berbasis masyarakat

Penguatan Kelembagaan

Kapasitasi layanan Posyandu sebagai Pos Komando Pusat layanan kesehatan dasar pada 5 Kabupaten dengan kasus stunting, PTM dan KIA tertinggi

- Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
- Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)
- Angka kematian Bayi (per 1.000 KH)
- Angka kematian Balita (per 1.000 KH)
- Prevelensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
- Cakupan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)
- Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
- Persentase Kabupaten/ Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif (%)

Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah, Bulog, Diskominfo, Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD, Dinkes



SEKOLAH VOKASI UNGGULAN BERBASIS POTENSI DAERAH

Pembangunan dan optimalisasi sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah



Pelatihan bagi guru/pendidik, pendampingan dan sertifikasi bagi siswa SMK dengan titik berat pada keahlian utk bekal dunia kerja, bekerja sama sengan BLK, pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana

- Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%)
- Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK (%)
- Jumlah Kab./Kota yang memiliki sekolah vokasi unggulan (SMK yang terakreditasi A minimal 1 disetiap Kab./Kota)
- Adanya SMK Kriya/Perkayuan berasrama di tiga pulau besar di NTT

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BLK, Akademisi, Diaspora, tenaga ahli terkait

Meningkatnya siswa NTT yang diterima pada sekolah kedinasan dan program beasiswa melalui fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan belajar



Kerja sama dengan pihak terkait, diaspora, para tenaga ahli yang berkompeten untuk bisa membimbing siswa NTT berprestasi agar lebih banyak diterima pada sekolah kedinasan dan beasiswa

Persentase siswa asal NTT yang diterima pada sekolah kedinasan dan program beasiswa



JALAN, AIR, LISTRIK, RUMAH LAYAK HUNI : MEWUJUDKAN NTT YANG SEJAHTERA

Kemitraan antara Pemerintah dan Sektor swasta

Studi kelayakan proyek strategis yang memerlukan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan

- Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)

Air Bersih

Membangun akses air bersih lintas wilayah

- Kapasitas air baku (m3/detik)
- Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)

Listrik

Bantuan meter listrik gratis untuk RT miskin

Studi kelayakan untuk energi listrik baru terbarukan di desa

- Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan meter
- Konsumsi listrik per kapita (kWh)
- Intensitas energi primer (SBM/Rp. Miliar)

Rumah Layak Huni (RLH)

Studi kelayakan untuk penyiapan data calon penerima bantuan RLH

- Presentase studi kelayakan yang ditindaklanjuti dengan penanganan RTLH
- Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
- Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)

jalan

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi

- Persentase jalan kewenangan provinsi dengan kondisi mantap (%)
- Waktu tempuh

Dinas PUPR, ESDM, DLHK, PMD, PLN, BPS, Balai-Balai Kemen PUPR BAPPERIDA



PENDAPATAN DAERAH NAIK, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN ASN TERJAMIN

Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah melalui peningkatan PAD

- Pajak daerah
- Retribusi daerah (optimalisasi kebun dinas dan instalasi)
- Optimalisasi hasil BUMD dan Perseroda

- Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (%)
- Tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak (%)
- Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah (%)

Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah

- Inventarisasi lengkap terhadap semua aset daerah
- Penyusunan Grand Design Asset Pemda
- Penambahan tenaga appraisal

- Tersedianya data inventarisasi asset
- Tersedianya grand desain asset pemda
- Tersedianya tenaga appraisal Pemda yang memadai

Badan Pendapatan dan Asset Daerah, Badan Keuangan Daerah, Bapperida, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah

Kesejahteraan Pegawai

Tambahan TPP ASN berbasis kinerja

- Persentase pertumbuhan TPP dibandingkan realisasi inflasi (%)



MEMBANGUN NTT DIGITAL : AKSES MERATA, KOMUNIKASI LANCAR

Pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi

Penyediaan akses internet dan teknologi digital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik

Perluasan infrastruktur digital untuk akses internet merata, komunikasi lancar, serta optimalisasi pembelajaran formal dan non-formal

Penggunaan teknologi digital untuk menunjang proses belajar mengajar.

Pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi

Penerapan SPBE dalam mendukung penuhi pelayanan pemerintahan yang transparan dan efisien

- Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)
- Indeks Masyarakat Digital
- Indeks SPBE

Dinas Kominfo,
Dinas P dan K



AYO BANGUN NTT, KOLABORASI BERSAMA

**Bersama
Mitra
Membangun
NTT**

- Kolaborasi bersama semua Lembaga mitra pembangunan
- Setiap PD minimal mempunyai 1 mitra pendamping

**Diaspora
bersama**

Pembentukan Sekretariat Bersama Kolaborasi 'Ayo Bangun NTT" di Kupang

Pembentukan Sekretariat Bersama Kolaborasi 'Ayo Bangun NTT" di daerah luar NTT dengan warga NTT dalam jumlah besar :
Bali, Malang, Jogjakarta, Batam, Balikpapan, Makasar, Jayapura, Darwin, Kuala Lumpur, Hong Kong, Roma, California

- Keterlibatan semua pihak secara aktif dalam Pembangunan di NTT secara inklusif, termasuk diaspora
- Adanya praktik baik yang bisa dipelajari dan direplikasi
- Share pengetahuan dan pola kerja
- Share program, kegiatan dan pembiayaan

**Badan Penghubung Prov. NTT,
Bapperida,
Biro Organisasi
Biro Hukum**



PROGRAM PRIORITAS TAMBAHAN

INSENTIF

Kepada tenaga medis di RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes serta melakukan evaluasi berkala setiap tahun.

**RSUD Prof. Dr.
W.Z.Johannes Kupang**

Guru SMA, SLB, SMK yang menjadi kewenangan Provinsi di daerah terpencil, serta melakukan evaluasi berkala setiap tahun untuk memastikan efektivitas program insentif bagi seluruh tenaga pengajar..

Dinas P&K

Tambahan Penghasilan (Tamsil) berbasis kinerja per tahun kepada tenaga penyuluh pertanian dan nakes di daerah terpencil

**Dinas Kesehatan, Dinas
Pertanian dan Ketahanan
Pangan, Dinas Peternakan**



PROGRAM PRIORITAS TAMBAHAN

**Sistem
Laporan Masyarakat Platform:
“LAPOR MELKI-JOHNIE”**

Aplikasi mobile maupun SMS/Telepon yang akan ditindaklanjuti dengan penanganan prioritas untuk masalah mendesak (dalam 24 jam)

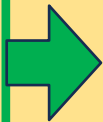
Membentuk tim “respon cepat” yang siap menindaklanjuti setiap aduan/laporan masyarakat agar bisa ditangani

**Dinas Kominfo,
Bapperida
Biro Organisasi
Biro Administrasi
pimpinan**



PROGRAM PRIORITAS TAMBAHAN

**JAMINAN
INSENTIF
PENDAMPING
KELUARGA PKH
DAN
PENDAMPING
DESA**



Insentif bagi pendamping keluarga PKH sebanyak 1400 orang @Rp.300.000,- x 12 bulan

Dinas Sosial



Insentif bagi pendamping desa sebanyak 1400 orang @Rp.300.000,- x 12 bulan

Dinas PMD



PROGRAM PRIORITAS TAMBAHAN

REFORMASI BIROKRASI

Program penggabungan dinas Pertanian dan Peternakan sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan serta efisiensi penggunaan sumber daya

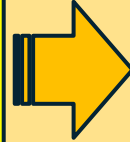
Program pembentukan Badan Ketahanan Pangan Daerah , terpisah dari Dinas Pertanian

**Setda Prov. NTT, (Biro Organisasi, Biro Hukum),
BKD**



PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (QUICK WINS) PROVINSI NTT

DASA CITA 1
DARI LADANG DAN LAUT KE PASAR: EFISIEN, MODERN, DAN AMAN
DASA CITA 2
MILENIAL DAN PEREMPUAN MOTOR KREATIVITAS LOKAL
DASA CITA 3
WISATA NTT PENGGERAK EKONOMI LOKAL



PENGEMBANGAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP)

DASA CITA 5
POSYANDU TANGGUH, MASYARAKAT SEHAT DAN BEBAS STUNTING



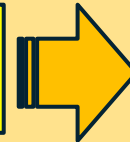
MEMPERKUAT POSYANDU DAN KADER KESEHATAN DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA STUNTING DI NTT.

DASA CITA 4 SEJAHTERA BERSAMA: JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN UNTUK MASYARAKAT
DASA CITA 6
SEKOLAH VOKASI UNGGULAN BERBASIS POTENSI DAERAH



PENDAMPINGAN SISWA MENUJU PENDIDIKAN TINGGI DAN SEKOLAH KEDINASAN UNGGULAN

DASA CITA 8
PENDAPATAN DAERAH NAIK, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN ASN TERJAMIN



MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DASA CITA 2
MILENIAL DAN PEREMPUAN MOTOR KREATIVITAS LOKAL
DASA CITA 3
WISATA NTT PENGGERAK EKONOMI LOKAL



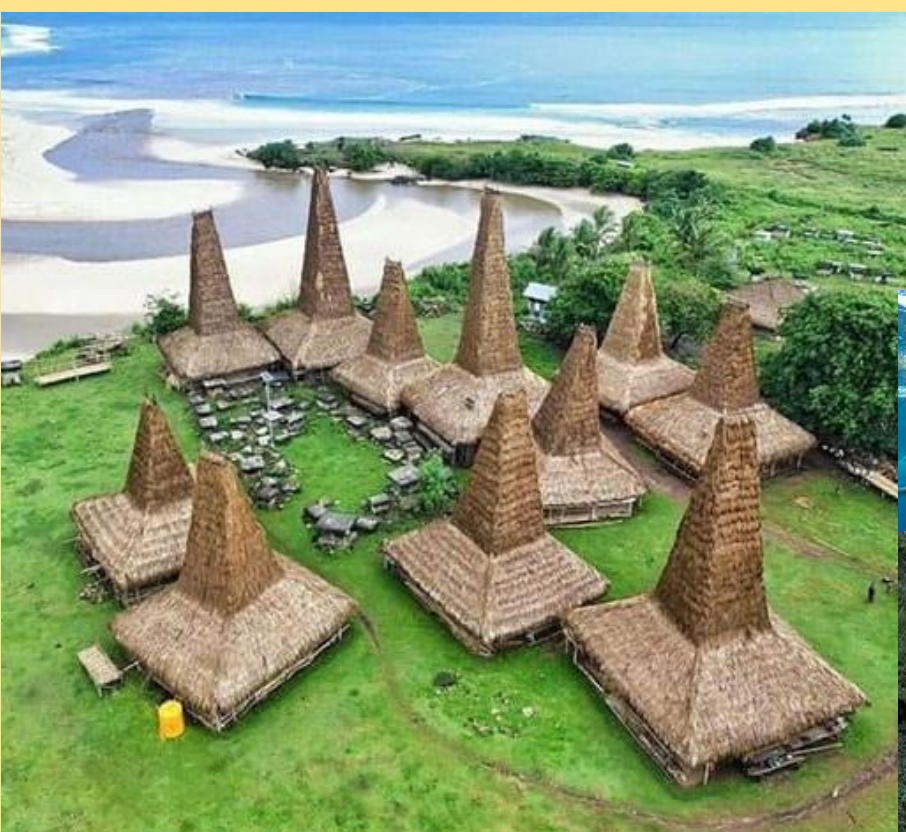
GERAKAN BELI NTT

DASA CITA 10
AYO BANGUN NTT, KOLABORASI BERSAMA

PROGRAM PRIORITAS TAMBAHAN REFORMASI BIROKRASI



PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN



TERIMA KASIH